

Muhammad Yusuf

Dosen Luar Biasa IAIN STS Jambi

Email: myusuf@gmail.com

Zuly Qodir

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Uni-

versitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: zuly_qodir@yahoo.com

[http://dx.doi.org/10.18196/](http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0012)

[jgpp.2014.0012](http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0012)

Resistensi Atas Kebijakan Pengelolaan Hutan (Studi Pada Masyarakat Orang Rimba di Provinsi Jambi)

ABSTRACT

The purpose of this research to answer the reason why the Indigenous resistance are still continue against the TNDB's policy and TNDB's response as government representative to the Indigenous. With study case and ethnography approaches, this kind of research is a descriptive-qualitative research. The primer data are used through interview and observation; the secondary data are also used from primary documents and secondary documents. The circumstance of indigenous resistance is change from covered to open conflict because many intervention from the TNDB office. The effort resistance of closed form which are opening land continuously, selling natural resources, terrain selling, chattering to everyone, also absent from TNDB's department call. Even the effort resistance of open form blocking the TNDB's officer to enter the place, open debating and discussing individual and collective and collective force behavior. The finding of this research shows the reason why the indigenous resistances are still continuing: 1). There is a disappointment in TNDB's policy because it commits unilaterally from government, 2). The ruining of indigenous law cause the function of law itself doesn't work anymore, 3). Cooperation and influence from outsider 4). Competitive natural resources management between indigenous with indigenous people, also indigenous with outsider 5). The increase of living cost make indigenous forces to take risks either in closed form or open form.

Keywords: Indigenous resistance, Forest Management Policy, TNDB

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab alasan mengapa perlawanan Adat masih terus melawan kebijakan TNDB dan respon TNDB sebagai wakil pemerintah untuk Adat. Dengan studi kasus dan etnografi pendekatan, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Data primer yang digunakan melalui wawancara dan observasi; data sekunder juga digunakan dari dokumen primer dan dokumen sekunder. Keadaan resistensi adat adalah perubahan dari tertutup untuk membuka konflik karena banyak intervensi dari kantor TNDB. Upaya perlawanan dari bentuk tertutup yang membuka lahan terus, menjual sumber daya alam, jual medan, berceletoh kepada semua orang, juga absen dari TNDB department panggilan. Bahkan upaya perlawanan dari bentuk terbuka menghalangi petugas TNDB untuk memasuki tempat, debat terbuka dan membahas perilaku kekuatan individu dan kolektif dan kolektif. Temuan penelitian ini menunjukkan alasan mengapa resistensi adat masih terus: 1). Ada kekecewaan dalam kebijakan TNDB karena itu melakukan sepihak dari pemerintah, 2). Penghancuran hukum adat menyebabkan fungsi hukum itu sendiri tidak bekerja lagi, 3). Kerjasama dan pengaruh dari luar 4). manajemen kompetitif sumber daya alam antara masyarakat adat dengan masyarakat adat, juga adat dengan luar 5). Peningkatan biaya hidup membuat pasukan adat untuk mengambil risiko baik dalam bentuk tertutup atau bentuk terbuka.

Kata Kunci: Perlawanan Orang Rimba, Kebijakan Pengelolaan hutan, TNDB

PENDAHULUAN

Orang rimba yang menetap hidup berburu dan meramu di TNBD dihadapkan oleh tiga mainstream besar terkait politik, ekonomi dan sosial budaya (Naim, 2007: 4). Dimensi politik, secara konstitusional mereka diakui akan tetapi diperlakukan berbeda dengan masyarakat pada umumnya (Orang terang). Perlakuan diskriminatif tersebut ditandai dengan perluasan kawasan proteksi hutan melalui kebijakan pengelolaan TNBD berisi tentang pembentukan zonasi, yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona rehabilitas, zona tradisional dan zona lain. Zona inti menurut aturannya adalah kawasan yang tidak boleh dimasuki, diakses, dan dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk Orang rimba, demikian pula dengan zona rimba dan zona rehabilitas, dalam hal ini Orang rimba yang sudah lama mendiami dan bergantung hidup di kawasan Bukit Duabelas hanya boleh menempati dan menjalankan aktifitas ekonomi dan tradisi di area zona tradisional yang berada pada pinggir kawasan TNBD (BKSDA, 2004: 63-66).

Dalam segi ekonomi, tanah yang ditempati oleh Orang rimba pada dasarnya memiliki sumber daya alam yang melimpah, hak ulayat mereka senantiasa diusik bahkan dicaplok tanpa ada ganti rugi. Berbagai hasil hutan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh Orang rimba untuk kebutuhan hidup anak-istri serta anggota keluarga lainnya kini tidak dapat diakses seperti dahulu kala.

Dari segi kehidupan sosial budaya, Orang rimba dihadapkan perubahan sosial kultural dan lintas budaya, *local wisdom* sebagai simbol keagungan mereka secara bertahap semakin terkikis. Adanya kebijakan pengelolaan taman nasional struktur sosial Orang rimba berubah, menurut Weintre (2003: 8) struktur sosial Orang rimba terfragmentasi menjadi tiga sub-bagian. *Kelompok pertama*, masih tradisional atau dengan perubahan minimal, yaitu kelompok yang patuh mengikuti kebudayaan sebaik mungkin yang diwariskan dari nenek moyang. *Kelompok kedua*, yang masih tinggal di pinggir daerah

332 tradisional, yang kurang bisa mengadopsi semua ciri-ciri hidup *post-traditional* tetapi sudah masuk beberapa tipe dari masyarakat *post-traditional* dan *Ketiga*, kelompok yang tidak mampu mengre-fokuskan atau mengorientasikan diri untuk memenuhi kebutuhan primer tanpa melebur diri dengan masyarakat luar.

Menurut Lobja (2003: 4) pola pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat lokal selama ini dilakukan selalu berdasarkan konsep nilai dan budaya lokal yang dimilikinya, sehingga segala sesuatu yang dirasakan tidak mendukung pola pemanfaatan lingkungannya itu dianggap sebagai sebuah pengebirian hukum adat. Kebijakan pengelolaan TNBD melahirkan bibit perlawanan sebagai upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian TNBD meminjam istilah yang dikemukakan oleh Scott (1993: 277) adalah “pelawanan sehari-hari”. Kajian perlawanan Orang rimba tidak terlepas dari keterlibatan aktor baik perorangan maupun kelompok, ideologi serta aksi-aksi yang dilakukan untuk menunjukkan eksistensi sebagai orang yang dirundung berbagai tekanan. Bentuk-bentuk perlawanan seperti ini menurut Brectian dalam Scott (1993: 271) merupakan bentuk menolong diri pribadi, secara tipikal berusaha menghindari konfrontasi dengan penguasa atau norma elit.

KERANGKA TEORI

TEORI RESISTENSI

Studi resistensi merupakan bagian dari gerakan dan aksi sosial dalam banyak aspek kehidupan sosial, aksi sosial dipandang sebagai aksi menentang negara dan kebijakan Negara. Perjuangan atau politik *grass-root* demi kepentingan manusia melibatkan aktor dan partisipan (Sing, 2010: 130-132). Gerakan sosial difahami sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang tak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di dalam sebuah masyarakat (Mirsal, 2006: 6). Gerakan sosial mencakup perilaku kolektif, gerombolan orang

banyak, massa, berorientasi pada nilai dan antisistemik dalam bentuk dan simbolisme (Gaus dan Kukathas, 2012: 610-611). Mengacu pada pandangan Sunarto dalam Hiareic (2004., ed., *et al*: 168-169) Manifestasi gerakan itu berupa *mob*, mengambil bentuk kerusuhan dilakukan oleh sekelompok orang secara terarah dan akan bubar setelah tujuan tercapai dan *riot*, dengan format gerakan yang sedikit berbeda, diartikan sebagai kerusuhan yang dilakukan sekelompok orang tanpa tujuan yang terarah dan akan bubar bila kehabisan tenaga.

Akar kata resistensi mengacu dalam kamus Oxford, *resistance* (perlawanan) sebagai aksi yang dilakukan untuk bertahan, menentang dan perlawanan (Hornby, 1995: 998). Makna resistensi berdasarkan aksinya sejarawan memberikan makna sebagai aktifitas kolektif (Praeger, 1993: 27 dalam Ross, 2006: 5). Menurut Scott terdapat dua model perlawanan yaitu "*open and hidden forms of resistance*". Lebih lanjut ia mengajukan pandangannya bahwa: "*the nature of resistance is greatly influenced by the existing forms of labor, control and by beliefs about the probability and severity of retaliation*" (Scott, 1985: 34). Strategi resistensi dapat dianggap sebagai tujuan untuk mengubah struktur sosial dan sistem dominasi (*social structures and systems of domination*) (Horowitz, 2005: 2107 dalam Cote dan Cliche, 2011: 128).

Kasus di Malaysia petani menggunakan metode perlawanan sehari-hari, seperti menyebarkan fitnah, pencurian, pembakaran dan klaim berlebihan untuk melawan tindakan para elite penguasa. Metode ini ditandai dengan perencanaan kecil yang mereka butuhkan, mereka menghindari konfrontasi langsung, dan fungsi mereka sebagai jenis *self-help* bagi para pelaku (Holmes, 2007: 185-186)

Menurut pandangan Oommen dalam Sing (2010: 302) terhadap studi protes, ditengarai sekurang-kurangnya ada lima jenis: 1). Aksi-aksi kekerasan kolektif terorganisir, 2). Aksi-aksi non-kekerasan

kollektif yang terorganisir, 3). Mobilisasi pada level mikro (*micro-mobilisation*) yang bersifat non-kekerasan atau kekerasan dan terorganisir, 4). Mobilisasi pada level mikro (*micro-mobilisation*) yang bersifat sesaat dan tak terorganisir dan 5). Protes-protes individual.

Sebagaimana disarankan Scott (1990) dalam Wiratmoko *et. al* (2004: 222) bentuk resistensi dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. *Pertama, public transcript*: adalah bentuk resistensi terbuka, misalnya pertunjukkan di atas pentas diibaratkan pemain teater yang harus hidup di dua dunia, yakni dunia nyata sehari-hari dan dunia berpura-pura di atas panggung. *Kedua, hidden transcript*: adalah bentuk resistensi yang dilakukan tersembunyi atau tepatnya di belakang. Resister berpura-pura bersikap baik di depan lawannya tetapi di belakang mereka membicarakan lawannya dengan gosip, fitnah, mengumpat dan sebagainya. Oommen dalam Sing (2010: 303) memetakan ekspresi perlawanan ke dalam dua versi yaitu yang diatur dan yang tidak diatur, yang masing-masing dijalankan sesuai dengan situasinya.

Lebih lanjut Eksein dalam Nurudin (ed) *et. al* (2006:10) menengarai ada dua penyebab ekspresi resistensi tersebut yakni: *pertama*, perlawanan terjadi karena adanya ketidakadilan dan penindasan yang tidak dapat ditolerir sehingga lahir sikap berani mengambil resiko dengan melakukan konfrontasi langsung terhadap hegemoni Negara. *Kedua*, lonjakan tuntutan hidup yang tidak dapat diatasi. Lebih lanjut ditegaskan pula oleh Scott sebagaimana diuraikan Nurudin (ed) *et. al* (2006:10) perlawanan merupakan akibat meluasnya peranan negara dalam proses transformasi pedesaan melalui revolusi hijau.

Perlawanan Masyarakat Hukum adat/*indigeneous people* dapat dilacak dalam tulisan Regpala dalam Ghee dan Gomes (1993: 178) studi kasus perlawanan Orang Asli di Cordillera terhadap invasi dan perubahan yang di paksakan dari luar. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa orang Igorot (Orang Asli) sejak tahun 1571

mengenal kolonialisme Spanyol yang dimulai dari aktifitas pencarian emas di daerah Cordillera, mereka melakukan perlawanan secara terbuka dan secara diam-diam. Perlawanan tersebut mampu membasmi pasukan penyerbu Spanyol di dalam hutan yang mencoba menaklukkan Orang Igorot namun berakhir kemenangan dipihak Orang Igorot dan kekalahan di pihak Spanyol.

Dalam konteks Indonesia perlawanan Masyarakat Hukum Adat ditemui di dalam tulisan Cote dan Cliche yang berjudul *Indigenous Peoples' Resistance to Oil Palm Plantations in Borneo* (2011: 121). Tulisan tersebut mengkomparasi perlawanan masyarakat adat di Malaysia dan Indonesia. Lebih lanjut diuraikan bahwa perlawanan masyarakat adat serawak Malaysia menggunakan dua strategi yaitu *legal action and staging a blockade* dan perlawanan masyarakat adat di Kalimantan cenderung menggunakan *violent strategies* seperti menghancurkan pohon kelapa sawit, menghancurkan bangunan, dan merebut atau merampas mesin.

TEORI KONFLIK

Menurut Tourine dalam Sing (2010: 152) gerakan sosial mesti difahami sebagai suatu tipe khusus dari konflik sosial. Sebuah konflik terdapat aktor-aktor yang bertentangan atau bersaing serta sumber daya yang mereka perebutkan. Lebih lanjut konflik melalui tahapan taruhan yang dianggap bernilai dihasratkan oleh dua atau lebih pihak yang bertentangan yang melibatkan sekumpulan aktor yang terorganisir, pertarungan nilai dan pergumulan/kompetisi untuk mencapai apa yang dipertaruhkan. Secara harfiah di dalam kamus Oxford konflik dipahami sebagai *serious disagreement, serious difference of opinion*, antara pihak satu dengan pihak yang lain (Hornby: 1995, 241). Menurut Pruitt dan Rubin (2004: 9) konflik merupakan perbedaan persepsi kepentingan (*Perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

Menurut Dahrendrof dalam Veeger (1990: 214) analisis masyarakat dengan memakai segi pandangan konflik, bertitik tolak pada dua kenyataan bahwa anggotanya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu, orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai. Dualisme ini termasuk dalam struktur kepentingan tiap-tiap kepentingan dalam kehidupan bersama mengakibatkan kepentingan-kepentingan yang berbeda dan mungkin saling berlawanan. Pada gilirannya diferensiasi kepentingan dapat melahirkan kelompok-kelompok yang berbenturan. Dahrendrof membagi tiga kelompok kepentingan dalam kepentingan: 1). Kekuasaan, 2). Kepentingan, dan 3). Kelompok konflik.

Menurut jenisnya, konflik dapat berupa konflik vertikal yang merupakan konflik antar rakyat dan pemimpinnya, dan konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar-etnis, pemeluk agama budaya dan antar kelompok-kelompok sosial (Nugroho, 2012: 448). Konflik seperti menghantui hampir setiap negara berkembang dalam kondisi yang sengaja diciptakan atau dibiarkan.

Menurut Dahrendrof dalam After (1977: 626) di dalam suatu struktur fungsionalis terdapat asumsi bahwa setiap masyarakat relatif kukuh, masyarakat merupakan struktur unsur yang sangat terintegrasi, setiap masyarakat mempunyai fungsi untuk memberi dukungan kepada pemeliharaannya sebagai suatu sistem dan dalam struktur sosial yang masih berfungsi didasarkan pada konsensus para anggotanya. Di dalam teori konflik sebaliknya tergantung pada asumsi yang sangat berbeda:

- a. Setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk pada berbagai proses perubahan, perubahan sosial bisa terjadi di semua hal.
- b. Setiap masyarakat dalam setiap hal memunculkan perselisihan dan konflik: konflik sosial bisa terjadi di semua hal.
- c. Setiap masyarakat selalu diwarnai oleh paksaan dari beberapa anggotanya kepada anggota yang lain (Dahrendrof dalam After, 1977: 626).

Menurut Pruitt dan Rubin (2004:143-146) ada lima macam transformasi yang terjadi selama proses eskalasi konflik, meskipun tidak seluruhnya terjadi di dalam satu konflik. Kelima macam transformasi tersebut adalah: *a. Ringan ke Berat*: Usaha untuk mendapatkan sesuatu di dalam suatu pertukaran kompetitif biasanya dimulai dengan usaha yang lebih ringan: ingrasiasi, gamesmanship, argumentasi persuasif, dan janji. Di banyak kasus, taktik-taktik yang lembut ini pada akhirnya digantikan oleh yang lebih berat, seperti ancaman, komitmen yang tidak dapat diurungkan. *b. Kecil ke Besar*: Ketika konflik bereskalasi, ada kecenderungan bahwa isu-isu yang ada mengalami poliferasi. Ada kecenderungan bahwa masing-masing pihak menjadi semakin terserap ke dalam konflik yang terjadi dan bersedia mengerahkan sumberdaya guna memenangkannya. *c. Spesifik ke Umum*: Di dalam konflik yang bereskalasi, isu-isu spesifik cenderung berubah menjadi isu-isu umum, semula merupakan kepedulian kecil dan kongkrit cenderung menjadi besar dan melibatkan semua posisi, disertai dengan ketidaktoleransian terhadap pihak lain. *d. Berhasil Menang ke Menyakiti Pihak Lain*: Pada tahap awal dari banyak konflik semua berusaha sebaik mungkin untuk kepentingannya sendiri, tanpa mempedulikan baik dan buruknya hasil yang diperoleh orang lain. *e. Sedikit ke Banyak*: Konflik yang dimulai dengan agitasi yang dilakukan oleh sedikit peserta sering kali tumbuh menjadi tindakan kolektif, ketika salah satu pihak merasa gagal untuk memenangkannya.

Menurut Pruitt dan Rubin (2004: 200-214) eskalasi konflik diamati melalui pendekatan tiga model konflik yaitu: *pertama: Model Agressor-defender*, model ini menarik garis diantara kedua pihak yang berkonflik. Salah satu pihak sang *aggressor* (penyerang) dianggap memiliki suatu tujuan yang mengakibatkannya terlibat di dalam konflik bersama pihak lainnya, sang *defender* (pihak yang bertahan), *kedua: model spiral-konflik*, eskalasi konflik merupakan hasil dari suatu lingkaran setan diantara aksi dan reaksi. Di dalam spiral bersifat

balas-balasan (*retaliatory*), masing-masing pihak menjatuhkan hukuman kepada pihak lain yang dianggap tidak menyenangkan, dan *ketiga: Model perubahan struktural*, model ini menjelaskan bahwa konflik residu yang berupa perubahan-perubahan yang terjadi baik pada pihak-pihak yang berkonflik maupun masyarakat dimana mereka tinggal. Residu ini kemudian mendorong perilaku pertengkaran lanjutan yang levelnya setara atau lebih tinggi dan mengurangi usaha untuk mencari konflik. Setelah konflik memuncak maka akan terjadi deeskalasi konflik, Deeskalasi konflik menurut Pruitt dan Rubin (2004: 292-295) terjadi karena *a.* tidak melakukan apapun (*no action*), *b.* mengalah (*yielding*), yaitu salah satu pihak mengalah, menyerahkan harga diri begitu saja terhadap pihak lain, *c.* menarik diri (*withdrawing*), memilih langkah untuk tidak melanjutkan konflik, *d.* pemecahan masalah (*problem solving*),

Pembahasan gerakan sosial dan resistensi tidak dapat dipisahkan dengan konflik, dimana terjadi gap kepentingan antara pihak satu dengan lainnya antara yang dikuasai dengan penguasa atau antara penguasa dengan penguasa lainnya. Menurut jenisnya konflik terdiri konflik vertikal dan horizontal yang bersifat laten dan manifest disebabkan adanya pergeseran struktur sosial suatu masyarakat, jika konflik terjadi diyakini akan melahirkan tindakan perlawanan dari pihak yang dimarjinalkan. Dari perspektif ini mengasumsikan bahwa dialektika gerakan perlawanan muncul sebagai respon terhadap kebijakan dan campur tangan yang berambisi melakukan perubahan terhadap objek yang dituju.

KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik menurut Dye dalam Indiahono (2009: 17) adalah: “*whatever governments choose to do or not to*”. Maksudnya bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang ekspilisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interpretasi dari kebijakan menurut Dye di atas dimaknai dengan dua hal penting: *pertama*, bahwa kebijakan

haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan *kedua*, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Lebih lanjut Anderson dalam Indiahono (2009: 17) mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Ditambahkan pula bahwa kebijakan tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.

Menurut Marzali (2012: 20) kebijakan merupakan alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah, dengan cara memberi *rewards* dan *sanctions*. Oleh karena itu kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Siapa yang menyimpang dari kebijakan dari kebijakan tersebut akan dikenai sanksi atau hukuman. Menurut Dunn (2000: 25) kebijakan proses pembuatan kebijakan beberapa tahapan sebagaimana berikut: penyusunan agenda, adopsi kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian/evaluasi kebijakan. Tahapan kebijakan tersebut lebih lanjut dijelaskan pula oleh Winarmo (2012: 36-37) tahap *penyusunan agenda*, penempatan masalah oleh pejabat yang terpilih untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Tahap *formulasi*, pendefinisian, pembahasan dan pemilihan alternatif kebijakan. Tahap *adopsi*, suatu kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga. Tahap *implementasi*, dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen pemerintah di tingkat bawah. Tahap *evaluasi*, kebijakan yang telah dijalankan dinilai atau dievaluasi sejauh mana suatu kebijakan yang dibuat telah ditetapkan telah memecahkan masalah.

Menurut Nugroho (2012: 131) terdapat dua bentuk kebijakan publik, *pertama*: pernyataan publik yaitu, pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi dan dikutip oleh media massa dan

disebarluaskan kepada masyarakat luas, pernyataan yang disampaikan dalam ruang privat tidak dapat dianggap sebagai kebijakan publik, *kedua*: diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi secara legal dan formal. Setiap kebijakan dari tingkat pusat sampai tingkat lurah adalah kebijakan publik karena mereka merupakan pejabat publik yang dibayar oleh uang publik melalui pajak dan penerimaan Negara lainnya, dan secara hukum formal bertanggung jawab kepada publik. Rentetan kebijakan tersebut dikelompokkan sebagaimana berikut:

- a. Kebijakan publik yang bersifat *macro* atau umum, atau mendasar. Seperti Undang-Undang Dasar, Tap MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kabupaten atau Kota.
- b. Kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah, atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota. Kebijakan dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antar-menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat *micro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, metode pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), pertanyaan diajukan berkenaan dengan bagaimana (*How*) dan mengapa (*why*). Untuk membantu dalam memahami setting sosial, ekonomi dan sistem politik Orang rimba maka penelitian ini juga melibatkan metode etnografi, mendeskripsikan suatu kebudayaan, tujuan utama yang ingin dicapai.

Penelitian ini dilaksanakan di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) provinsi Jambi yang meliputi kawasan konservasi dan kawasan penyangga. Data diperoleh dari tiga desa yaitu: Desa Sei Ruan Ulu (Kabupaten Batanghari), Desa Pematang Kabau (Kabupaten Sarolangun) dan desa Tanah Garo (Kabupaten Tebo).

Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari: a). Data primer: didapatkan dari hasil wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, observasi dan etnografi, dan b). Data sekunder: diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya (berupa skripsi, tesis dan disertasi), jurnal, buletin, majalah, buku, surat kabar, internet dan sumber pendukung lainnya. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah *pertama*: Orang rimba yang kontra/resisten terhadap kebijakan RPTNBD yang terdiri dari 11 rombongan/kelompok baik yang berada di dalam kawasan hutan TNBD maupun yang telah hidup di luar hutan, *kedua*: Balai TNBD sebagai lembaga yang meregulasi dan memberlakukan kebijakan pengelolaan hutan. Informasi maupun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digali dengan dua cara, yaitu (1) menentukan *key person*, (2) *snowball sampling*. Informan yang diwawancarai adalah Balai TNBD 5 orang, Orang rimba 12 orang, KKI Warsi 2 orang, Walhi Jambi 2 orang, Warga desa (Sei Ruan Ulu, Tanah Garo dan Pematang Kabau) 12 orang. Data yang diperoleh dianalisis sebagaimana berikut: a). Reduksi data (*data reduction*), b). Penyajian data (*data display*), c). Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conduction drawing and verificatio*

PEMBAHASAN

BENTUK PERLAWANAN SEHARI-HARI ORANG RIMBA

Embrio perlawanan orang rimba terhadap kebijakan pengelolaan hutan Taman Nasional Bukit Duabelas melalui SK Menhutbun Nomor 258/Kpts-II/2000 telah ada sejak proses perumusan. Upaya penolakan termanifestasi ke dalam gerakan penolakan terhadap sistem zonasi serta aturan-aturan yang berlaku di dalam kawasan

342 yang dinilai kontroversial terhadap hukum adat dan berpotensi mengancam masa depan orang rimba. Gerakan perlawanan itu mencapai tingkat penetapan bersama antara pengelola taman nasional dengan orang rimba yang didampingi oleh LSM KKI Warsi, Sokola Rimba dan Walhi Jambi. Kesepakatan tersebut pengelola taman mengadopsi klaim tanah adat orang rimba disesuaikan dengan sistem zonasi.

Pasca penetapan bersama sistem zonasi pengelolaan taman nasional pada bulan Desember tahun 2009, *Everyday form of resistance* orang rimba terus berlanjut dan berevolusi dari satu bentuk perlawanan menjadi perlawanan model baru. Beberapa tahun kemudian gerakan protes dan perlawanan mengalami penurunan, dikarenakan gerakan-gerakan pasca penetapan bersifat reaktif, responsif terhadap terganggunya kepentingan mereka. Mereka tidak membangun *framework* gerakan yang komprehensif, sistematis, cenderung reaktif, gampang membuat koalisi dan dengan mudah kemudian bubar dengan sendirinya. Adapun bentuk-bentuk perlawanan orang rimba sebagaimana berikut:

A. *HIDDEN RESISTANCE*

Bentuk perlawanan *hidden*/tertutup rutin secara individual dan berkelompok bersama-sama dengan temenggung, atau membangun koalisi dengan kelompok lain. Kesadaran akan penentangan yang dilakukan tidak disertai dengan tujuan bersama yang diorganisir, mereka cenderung bermain sendiri-sendiri ataupun kolektif yang tidak terorganisir dengan baik. Berikut penulis uraikan upaya-upaya yang dilakukan orang rimba:

Membuka ladang dan humo baru di dalam kawasan: Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) bermakna strategis menyangkut sosial, ekonomi dan ekologis. Penulis mengidentifikasi hampir semua orang rimba yang berada di Makekal Ulu, Tengah dan Ilir membuka ladang dan humo, mereka yang berada di Kejasung Besar, Kejasung Kecil dan di sungai Durian membuka lahan tidak kalah dengan di

Makekal. Begitupula dengan mereka yang berada di Air Panas, di Ujung Kutai, di Singosari dan mereka yang tinggal di Bukit Suban. Meskipun mereka sudah tinggal bekampung dengan orang terang akan tetapi mereka belum memiliki pekerjaan tetap, sumber kehidupan mereka masih bertumpu kepada hutan lindung.

343

Perlawanan bersifat passif ini mengundang kegerahan bagi pengelola taman. Lahir kebijakan untuk membatasi pembukaan lahan bagi orang rimba karena kawasan seluas 60.500 ha diperkirakan yang dahulunya sebagai Cagar Biosfer seluas $\pm 30\%$ yang masih utuh. Pembatasan skala pembukaan lahan maksimal 2 hektar terhadap Orang rimba dipandang membatasi hak ekonomi, hak akses dan bertentangan dengan aturan nenek morang mereka. Pengelola taman nasional dinilai tidak perlu ikut campur dalam urusan mereka. Orang rimba tidak menginginkan adanya pembatasan pembukaan lahan, meskipun ada aturan yang diberlakukan untuk membuka lahan secara terbatas yang dikelola secara intensif.

Jual hasil hutan: Penjualan hasil hutan khususnya kayu hutan dalam bentuk *serpehan* dari kawasan akhir-akhir ini sangat intensif. Kayu-kayu yang memiliki ekonomi tinggi seperti tembesu, kulim, meranti dan kayu lainnya menjadi sasaran para illegal logger. Kayu-kayu hutan tersebut dijadikan komoditi oleh para pemodal lokal untuk dapat diperjual belikan. Toha sejak masa masa Cagar Biosfer (CB) sering *bebalok* bahkan lama menjadi bos kayu. Aktifitas tersebut setelah CB beralih status menjadi taman nasional terus berlanjut. Menyusul Gentar dan Bambang serta orang rimba lain yang sering keluar dari rimba berinteraksi dengan warga desa sering menjual *serpehan*. Salah satu toke kayu di tingkat desa mereka adalah pak Wawan, dia sering berurusan dengan polisi kehutanan, namun tidak ada tindakan khusus yang berefek jera untuk menghentikan perjarahan yang dilakukan oleh Wawan. Orang Lubuk Bumbun belakangan gencar menjarah ke dalam taman nasional, salah satu

cara untuk dapat masuk ke dalam kawasan mereka membeli *serpehan* dan lahan dari orang rimba. Aktifitas apapun di dalam kawasan taman nasional seluas 60.500 h sulit terpantau oleh Polhut yang hanya berjumlah 16 orang. Kondisi seperti ini justru dimanfaatkan oleh orang rimba dan orang terang yang berada di daerah kawasan penyangga, dari luar kabupaten Tebo, Sarolangun dan Batanghari berkompetisi dalam melakukan aktifitas pengolahan kayu di dalam kawasan. Rantai kayu sebagaimana hasil wawancara dengan Aritorang:

Rantai kayu ada toke besar di Jambi, kemudian toke menengah di kabupaten., lalu ada toke-toke kecil di desa, nanti toke kecil di desa punya anak buah sekitar lima sampai tujuh orang yang bekerja dalam hutan. Orang rimba difungsikan sebagai surveyor, tapi kadang juga menjadi bagian yang memotong kayu, kadang-kadang orang rimba juga menjadi sebagai toke, seperti Bahtiar itu sudah lama sebagai toke kayu, Ngamal juga lama jadi toke kayu, itu bisa terjadi., Rentetan itu walaupun sudah menjadi taman nasioanl, itu masih berlangsung (wawancara, 3 Maret 2014).

Orang rimba menganggap bahwa hutan merupakan sumber hidup dan penghidupan mereka sejak nenek morang dahulu. Pembatasan akses orang rimba terhadap hutan menimbulkan kegerahan, orang rimba tetap berusaha mengakses hasil kayu yang menurut mereka membantu kehidupan ekonomi mereka dengan mengabaikan aturan yang berlaku di dalam kawasan.

Jual lahan: Penjualan lahan yang dilakukan oleh orang rimba dengan orang terang umumnya berbeda dengan penjualan lahan yang dilakukan oleh orang terang dimana mereka menggunakan saksi, dicatatkan di akte notaris, menggunakan kwitansi. Penjualan lahan hanya menggunakan transaksi secara lisan.

Orang rimba yang melakukan jual beli pertama adalah Ngukir, orang rimba lain yang melihat hasil jual lahan ternyata uangnya besar ikut jual lahan. Agar mereka dapat izin dari Ngukir mereka

harus menjempol Ngukir dengan uang. Menyusul orang rimba lain seperti Mrengkuh yang menjual lahan milik bapaknya pak Tarip untuk berjudi, minum-minuman keras dan untuk pesta dangdutan/organ tunggal di desa.

TABEL 1: DATA KEPEMILIKAN LAHAN ORANG TERANG DI DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS.

No	Desa	Jumlah pemilik kebun	Perkiraan luas yang terdata	Rata-rata luas perorang	Tanaman
1	Bukit Suban	155 org	± 196,8 Ha	± 1,27 Ha	Karet dan sawit
2	Pematang Kabau	253 org	± 478,25 Ha	± 1,89 Ha	Karet dan sawit
3	Lubuk Jering	266 org	± 825,50 Ha	± 3,10 Ha	Karet, durian, jengkol dan duku
4	Desa Semurung	110 org	± 299,75 Ha	± 2,725Ha	Karet, durian, jengkol dan duku
5	Desa Jernih	163 org	± 322,25 Ha	± 1,98 Ha	Karet, Durian, Jengkol dan duku
6	Desa Baru	63 org	± 126,5 Ha	± 2,00 Ha	Karet, durian, jengkol dan duku

Sumber: Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (dikelola).

Begitu juga dengan Rombong Betamat dia menjual lahan di Daerah Kembang Bungo. Pak Jelitai menjual tanah dari Sungai Pipi sampai sungai Siamang, uangnya dia pakai untuk membeli tanah di SP2 dan Mobil. Yang lebih parah rombongan Yazid menjual lahan mereka yang sudah dibuka, sudah ditanami dan hanya menunggu panen dijual seluas kurang dari seratus hektar. Nama-nama lain juga pernah menjual seperti Pak Grib yang tinggal Bendungan SPI, Nyujud, Skapak, Ngerak, Anka, Pak Telau. Pembeli lahan mereka berasal dari Limau Manis, Lubuk Bumbun, SP E dan daerah lain yang memiliki akses dan kepentingan terhadap lahan.

Daerah-daerah yang pernah menjadi penjualan lahan adalah: di daerah Makekal, Ujung Air Panas, Ujung Kutai, tempat-tempat tersebut memiliki jalur strategis karena memiliki jalan-jalan setapak yang memudahkan bagi para pemilik lahan untuk mengolah, merawat dan mengakses hasil kebun mereka. Kawasan tersebut

secara geografis sangat mudah dijangkau oleh orang dusun, orang transmigran dan orang yang datang dari berbagai daerah.

Dari data yang diperoleh oleh Balai Taman Nasional Bukit Duabelas dan dikomfirmasi melalui wawancara dengan Ngadap, didapatkan beberapa kebun milik orang terang yang berada dalam kawasan yang didapatkan melalui pembelian dari orang rimba dan membuka sendiri atau dengan cara lainnya. Tabel 1 menunjukkan kepemilikan lahan warga di dalam kawasan taman nasional bukit duabelas.

Dari data tersebut diidentifikasi wilayah yang berada di desa Bukit Suban dan desa Pematang Kabau merupakan desa transmigrasi dimana penduduknya mayoritas pendatang dari luar (suku Jawa, Padang, Batak), mereka mendapat kebun yang berada di luar kawasan pada saat mereka ikut transmigrasi (mendapat Lahan Usaha/LU), kepemilikan kebun yang berada di dalam kawasan Taman Nasional pada umumnya mereka membeli dari Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), atau mereka memanfaatkan Suku Anak Dalam untuk membuka kawasan menjadi ladang yang kemudian mereka upah atau dengan sistem bagi hasil.

Desa Lubuk Jering, Desa Semurung, Desa Jernih dan Desa Baru merupakan desa asli yang mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli/orang melayu Jambi setempat atau sering disebut Orang Dusun. Pada umumnya mereka memiliki kebun baik yang berada di luar kawasan maupun di dalam kawasan merupakan hasil menebang/membuka hutan sendiri atau mendapatkan warisan dari leluhurnya. Dari data yang telah disajikan di atas sebanyak 1.010 (seribu sepuluh) orang masyarakat desa yang memiliki kebun/ladang yang berada dalam kawasan Taman Nasional dengan perkiraan luas keseluruhan dari kebun/ladang tersebut diperkirakan $\pm 2.249,05$ ha (Balai Taman Nasional Bukit Duabelas).

Kawasan yang terletak di kabupaten Tebo khususnya di kawasan desa penyagga: Tanah Garo, Sei Jernih, Baru, Tambun Arang dan

Tuo Ilir. Di kabupaten Sarolangun, kawasan seperti desa Pematang Kabau, Semurung, Lubuk Jering, Jernih dan Bukit Suban. Di kawasan ini pada umumnya area perkebunan yang dapat digarap oleh orang terang sudah minim, salah satu alternatif untuk dapat mendapatkan lokasi perkebunan baru adalah hutan lindun. Di desa-desa penyangga inilah orang terang dengan orang rimba melakukan jual beli lahan serta kerja sama lainnya.

Proses jual beli lahan bisa berbagai macam model, *pertama*: orang rimba yang secara langsung menawarkan kepada masyarakat, model seperti ini biasanya kebun yang sudah digarap, ditanami karet atau sawit usia ± 2 tahun atau lebih ditawarkan kepada masyarakat desa Melayu atau desa Transmigran. *Kedua*: masyarakat di sekitar kawasan secara langsung bertanya kepada orang rimba terkait ladang atau kebun yang mau dijual oleh orang rimba, terdapat pula hubungan timbal balik antara yang membutuhkan lahan dan orang rimba yang mau jual lahan, dimana orang rimba ingin menjual lahan dan orang terang juga sedang mencari lahan untuk memperluas lahan perkebunan atau mereka yang belum memiliki kebun untuk kelangsungan hidup masa depan.

Model *ketiga*: model ini cukup intensif dilakukan adalah, Orang Terang membuka lahan secara diam-diam di dalam kawasan taman nasional Bukit Duabelas, namun aktifitas pembukaan lahan yang dilakukan oleh orang terang *tetangkap basah* tangan oleh orang rimba. Orang Terang yang membuka lahan dalam skala besar ditangkap tersebut kemudian melakukan negosiasi. Mereka tidak ingin kehilangan modal yang telah dikeluarkan untuk membuka kebun garapan, maka mereka tetap mempertahankan kebun mereka dengan membeli dari orang rimba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Syariman Pangkal Waris Tanah Garo:

Hutan dipancahi orang luar, ditangkap buat orang rimbo terus dinego, baru dibayar, terjadila jual beli,, masyarakat trans ko, mereka kan punyo anak-anak sementaro lahan yang biso digarap di luar kawasan

lah idak ado lagi, jadi mau idak mau mereka merembek ke dalam kawasan,.. Kadang-kadang mereka tu paruhan, duo hektar untuk yang punyo satu hektar untuk yang buat (wawancara, 29 Januari 2014).

Orang rimba kerap memberikan perlindungan kepada orang terang apabila terjadi permasalahan atau terkait kasus hukum dengan Balai Taman. Istilah yang sering digunakan adalah “*pasang badan*” orang rimba melindungi pembeli jika terjadi pemeriksaan oleh pengelola taman. Modus yang sering terjadi adalah jika terjadi pemeriksaan setiap ladang/kebun di kawasan, orang rimba yang mengakui kepemilikan lahan orang terang, pemilik sebenarnya adalah orang terang. Bentuk kerjasama lain juga dilakukan, orang terang yang memiliki kebun atau ladang di dalam kawasan meminta jaminan kepada orang rimba untuk melindungi kebun mereka dari pemeriksaan. Mereka menekan orang rimba apabila kebun atau ladang mereka digugat oleh pengelola taman nasional.

Orang terang tidak berani secara langsung membuka lahan di dalam kawasan, cara yang dilakukan adalah membebani Orang rimba dengan hutang, atau dengan cara mempekerjakan mereka. Jika orang rimba memiliki kebutuhan mendadak maka orang rimba menjual lahan tersebut karena telah terjadi hubungan timbal-balik antara orang rimba dengan orang terang. Orang rimba melaporkan penjualan lahan tersebut kepada pengelola taman, di samping juga petugas balai senantiasa menghimbau untuk melaporkan setiap ada pembukaan lahan dan penjualan lahan taman. Dengan demikian konflik horizontal antara sesama orang rimba beralih menjadi konflik vertikal antara petugas balai versus orang rimba yang berusaha mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan lahan yang telah digarap.

Model penjualan lahan yang sering terjadi dilakukan oleh Orang rimba sebagaimana dijelaskan oleh pak Selamat:

Biasanya sistem tukar dengan motor, itu yang kebanyakan. Biasanya mereka sama mereka tidak ada calo. Masyarakat di wilayah Sarolangun

sekitar 200 KK memiliki lahan di dalam kawasan, mereka boleh menyadap hasil karet yang ada di dalam kawasan. Cuma tidak boleh menambah lagi (wawancara, 04 Februari 2014).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, mereka menukarkan kebun hasil garapan mereka dengan motor yang diiming-imingi oleh pemilik motor dari orang desa yang ingin memiliki kebun, atau justru menambah kebun. Meskipun terlihat sangat sederhana model penjualan kebun tersebut namun mereka tidak meninggalkan bukti tertulis apapun, sehingga menyulitkan pengelola taman untuk mengidentifikasi kasus-kasus penjualan lahan.

Menceritakan, menggosipi dan tidak menghadiri panggilan pengelola taman: Fenomena orang rimba menceritakan kejelekan maupun kebencian mereka terhadap pengelola taman sedikit sulit untuk dijelaskan secara mendalam karena tidak semua aktifitas yang dilakukan sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 dapat terekam dengan rinci. Beberapa uraian-uraian dari beberapa informan Orang rimba, mereka merasakan tekanan-tekanan dari pengelola taman. Mereka berusaha untuk seobjektive mungkin memetakan masalah yang dihadapi terkait pengelolaan hutan.

Rombongan Celitai di SP 5 yang berasal dari Kejasung Besar sekarang bermukim di luar kawasan TNBD sejak tahun 2010-an. Kebijakan pengelolaan taman dipandang ambigu, orang rimba diberikan hak untuk hidup berusaha dalam bentuk apapun, berladang berpindah, behumo di dalam kawasan taman nasional akan tetapi orang rimba dibiarkan tanpa ada bimbingan atau pendampingan dari pengelola taman. Keluhan seperti ini dirasakan hampir semua orang rimba di dalam kawasan dengan intensitas yang berbeda-beda.

Masalah yang sama juga diajukan oleh rombongan temenggung Rahman, keluhan muncul ketika pengelola taman mengajak kerja sama dengan mereka. Mereka berusaha untuk mencegah dan mengawasi aktifitas pembukaan lahan baru dan penjualan lahan

350 akan tetapi pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak mendapat perhatian secara khusus dari pengelola selama bertugas, keluhan juga disampaikan mengenai kelelahan selama mengontrol, waktu yang dihabiskan, serta biaya selama mengontrol kawasan seluas 60.500 ha, yang tak kalah pentingnya sudah mulai berani berargumentasi dengan para pengelola taman nasional dengan dalih kebutuhan ekonomi yang tidak dapat dielakkan.

Pak Rahman, H Jailani (Temenggung Tarib), Celitai, Pembubar menurut pengamatan penulis mereka merupakan orang-orang yang mendukung kebijakan pengelolaan taman nasional. mereka mulai sadar ketika ancaman demi ancaman yang dihadapi oleh Orang Rimba tidak mampu dihadapi, mereka justru memilih untuk mengembalikan kembali hukum adat yang sudah ditinggalkan. Kesadaran mereka lahir dengan adanya kebijakan pengelolaan hutan sebenarnya justru sangat menguntungkan mereka, dengan adanya taman nasional menyelamatkan mereka dari ekspansi pemilik modal lokal yang berambisi untuk memperluas lahan dengan mengarahkan perhatian mereka ke taman nasional.

Berbeda halnya dengan Temenggung Ngadap yang masih menjaga adat mereka, beliau mengatakan bahwa:

Kalo balais ko idak ado perkembangan, tinggal lagi nang penduduk awak yang tejago,. Kalo kini satu kanti ngejar kekayaan, nang keduo kanti bekerai kepala' situnyo rubuh, jadi adat iko lah tinggal, disetop ado sesamo kami yang jual pado orang desa, jadi orang desa bekawan dengan orang kami mano nang bejual, jadi mengadokan kerapatan, jadi yang jual besepakat dengan pembeli, kami membeli jangan kamu rembet, sekuat-kuat kamu katokan itu kebun kamu, Orang Limau Manis, urang Lubuk Bumbun (wawancara, 22 Februari 2014).

Ngadap megeluhkan sikap pengelola taman nasional yang terkesan lalai dalam mengelola taman nasional. Meskipun tidak secara langsung disampaikan kepada pengelola taman nasional namun, dari kelompok Ngadap merasa benci dengan sikap tidak

pengelola taman nasional. Pengelola taman terkesan membiarkan penjualan lahan dan pembalakan liar yang dilakukan orang terang yang bekerja sama dengan orang rimba.

Protes-protes yang dilakukan dengan cara menggosipi pengelola taman di dalam kawasan maupun di luar kawasan mencuat karena tidak adanya kejelasan pola pengelolaan taman nasional. Orang rimba yang bersebrangan dengan pengelola taman, merasa kepentingannya terganggu, berbagai isu yang ia lontarkan serta berusaha untuk mencari sisi kelemahan pengelolaan taman. Legalitas taman nasional digugat dengan mengajukan pernyataan bahwa Bukit Duabelas adalah tanah milik nenek moyang mereka dan mereka juga mengaburkan tata batas taman dengan desa penyangga.

Kepentingan ekonomi dan politik Orang rimba terhadap sumber daya hutan menjadi terganggu ketika terjadi konflik vertikal orang rimba versus pengelola taman nasional. Orang rimba yang tidak memiliki kekuatan massa dan modal sosial lebih memilih untuk menarik diri dari pada beradu argumen. Pihak yang bermusuhan dengan pengelola balai sebagaimana diungkapkan oleh Ngadap:

Mano bagi yang bejual-bejual tu., itu bemusuh dengan orang balais, kerno ko tebuka topengnyoko tadi, cobo kalo nyo dipanggil ole dinas kehutanan, pait kalu mau., kalu perlu nyo lari, takut jugo (Ngadap, 22 Februari 2014).

Dari hasil wawancara tersebut terungkap jelas bahwa mereka menarik diri dan menghindari pertemuan dengan pengelola taman nasional. Kekuatan untuk berhadapan secara langsung tampaknya tidak begitu mencuat, ketika resister benar-benar tidak memiliki senjata untuk menyerang pengelola justru memilih untuk menghindar.

Pura-pura bodoh, Orang rimba yang selama ini dianggap tidak faham akan hukum yang berlaku di kawasan taman bukit duabelas, maupun hukum positif yang berlaku secara nasional. Kondisi demikian justru dimanfaatkan oleh orang rimba untuk melakukan

352 kegiatan seperti menjual hasil hutan, menjual lahan/ladang. Salah satu bentuk yang dilakukan pura-pura tidak tahu, tidak ingin memiliki KTP dengan alasan bahwa belum sesuai dengan adat yang mereka miliki. Penjualan kebun kepada warga/orang terang tidak menggunakan nota/kwitansi, tidak menggunakan saksi hanya dilakukan antara penjual dan pembeli.

Kondisi seperti ini kurang disadari oleh pengelola taman, dengan demikian justru mempermudah orang rimba untuk terus menerus melakukan hal yang sama. Perilaku seperti ini tidak hanya dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang rimba saja akan tetapi orang yang banyak berinteraksi dengan orang terang dan pengelola taman cenderung melakukan hal yang sama. Sikap pura-pura baik di hadapan pengelola taman nasional, mengatakan 'iyoo/ao' pada saat pengelola taman menyampaikan materi terkait aturan-aturan yang berlaku di dalam kawasan dan pengelolaan hutan. Proses pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu dan tak ingin tahu ini menular dari satu orang kepada orang rimba lain.

Mereka pura-pura tidak faham hukum Negara dan hukum syariat yang berlaku di dusun, dikemudian hari kebodohan ini justru dipelihara dan dijadikan senjata bagi mereka untuk melakukan apapun yang mereka mau. Sebenarnya mereka memahami aturan-aturan yang berlaku di terang, akan tetapi mereka menonjolkan ketidak tahuan tentang hukum negara dan hukum syariat. Mereka memahami hukum agama dan hukum Negara untuk mencari kelemahan-kelemahan hukum tersebut. Penggunaan kartu identitas, pencatatan transaksi jual beli apapun nyaris tidak pernah dilakukan.

Pengamatan penulis selama berada di lapangan penelitian, mereka memelas dihadapan pengelola taman, berpura-pura tidak memiliki uang, tidak kuat kerja karena sakit-sakitan dan ada kecendrungan mereka menghindari untuk diberikan tugas dari pengelola taman nasional baik itu bekerja untuk mengawasi kawasan, melaporkan pembukaan lahan baru dan penjualan lahan atau hasil

hutan berupa kayu maupun bentuk kerja tugas kerja lainnya. Mereka akan membantu pengelola taman dengan syarat mereka mendapat imbalan yang besar dan menguntungkan.

A. OPEN RESISTANCE

Perlawanan tertutup menjadi perlawanan terbuka, ketika perlawanan di balik layar tersebut mendapat gangguan dari internal maupun eksternal. Perlawanan bersifat konfliktual orang rimba dipicu oleh adanya hambatan-hambatan dari pengelola taman yang berusaha mencounter gerakan-gerakan tersebut. Gerakan perlawanan lebih reaktif berawal dari sorotan tajam, pencaplokan kehidupan dan pembatasan akses orang rimba terhadap sumber daya hutan termanifestasi dalam bentuk proteksi dan mencuat lebih ofensif. Berdasarkan data-data primer dan data sekunder yang penulis gali di lapangan, bentuk perlawanan terbuka orang rimba dijelaskan sebagaimana berikut:

Mencegah pengelola TNBD masuk kawasan: *Orang rimba mencegah pengelola taman nasional untuk tidak masuk ke dalam kawasan merupakan salah satu upaya perlawanan yang berlandaskan hukum adat. Upaya mencegah pengelola taman masuk ke kawasan diungkapkan oleh Surono selaku petugas MMP:*

Tahun 2013 orang kehutanan (Polhut 10 orang, MMP 5 orang) mau masuk ke hutan, sebelum masuk dah izin duluan sama temenggung mau ngecek lahan mana punya orang jawa dan mana punya orang dalam,.. trus pas mau masuk udah banyak orang dalam (rimba) menunggu di jembatan itu, kita kan cuma mau ngecek, udah gak jadi masuk pulang kita. Ngapo nak dicek, idak dicek pun idak hilang, katanya,.. waktu itu orang dalam menunggu di simpang Meranti, diprovokasi dari luar katanya mau nangkap toke, otomatis kalo orang nangkap toke, orang tu tidak bisa jual getah,. Pokoknya orang yang sering masuk kawasan itu bersatu dengan orang dalam, dari SPE, Limau

Manis (wawancara, 27 Januari 2014).

Aksi penolakan orang rimba terhadap balai terus berlanjut, orang rimba berusaha mencegah patroli yang dilakukan oleh pengelola taman apabila kawasan yang ingin dilalui berkaitan dengan tanah *pranokon*. Apabila petugas kehutanan ingin melakukan razia tapi ternyata melewati tanah *pranokon* yang bersamaan dengan perempuan melahirkan maka bagi orang rimba menjadi hal yang tabu untuk melewati kawasan tersebut.

Debat dan diskusi terbuka secara individu maupun kolektif: Berawal dari pembentukan organisasi Kelompok Makekal Bersatu (KMB) yang dibentuk pada tahun akhir tahun 2008-an oleh Pengendun dan kawan-kawan beranggotakan anak-anak muda dari sungai Makekal (Makekal Hilir, Makekal Tengah dan Makekal Ulu). KMB menggaling kekuatan dari pemuda-pemuda orang rimba yang berada di seluruh kawasan taman nasional Bukit Duabelas.

Mereka adalah murid-murid binaan Warsi yang difasilitasi oleh Butet Manurung yang kemudian hari mendirikan lembaga Sokola Rimba yang dibentuk pada tahun 2004. KMB lebih menekankan peran pemuda orang rimba untuk melakukan advokasi terhadap hak-hak mereka, pemuda yang dilibatkan pada umumnya mereka yang belum berkeluarga. Upaya perlawanan yang dilakukan adalah berusaha merubah regulasi sistem zonasi yang dibuat oleh balai taman nasional dengan menemui dan mengajukan argumen kepada balai Taman, menemui menteri kehutanan dan menemui AMAN pusat. Rahman yang memiliki nama Orang rimba Bekilat mengungkapkan keberanian untuk berdebat dengan pengelola taman nasional, keberanian untuk menentang pengelola tersebut diungkapkan berikut:

Ado kerutu'an, kemarahan sayo dari kehutanan, dio minta' bantuan dari sayo jadi kato sayo, sayo mau berjuang membantu pemerintah, membantu melihat-lihat hutan, ado yang dibuka ado yang digarap, aku kasi laporan, cuma bolehlah aku membantu, cuman kamulah tolonglah

pikirkan aku ini urang hidup miskin, jadi kalu aku selalu mendampingi kamu, membantu kebutuhan kamu nafkah rumah tanggo sayo ni, tebengkalai, nak nunggu petugasan dari kamu satu minggu apo ado masuk apo idak (wawancara, 16 Januari 2014).

Hampir keseluruhan mereka yang berada di luar kawasan memiliki argumen yang sama, tidak segan-segan mengajukan alasan mereka yang jika dipikir alasan tersebut memang logis. Alasan perut dan tanah nenek moyang tidak luput dari isi perdebatan yang dilontarkan ketika menghadapi balai taman nasional. Alasan itu sebenarnya alasan semata saja untuk mengelabui para petugas yang berusaha untuk membatasi perladangan serta aktifitas mereka di dalam kawasan.

Di daerah Makekal terjadi penjualan lahan oleh orang rimba kepada orang terang. Orang rimba dari kelompok lain mengajukan protes kepada pengelola taman dengan mempertanyakan mengapa penjualan tersebut tidak ditindak padahal mereka telah melapor. Peristiwa demo orang rimba yang difasilitasi oleh KKI Warsi pada tahun 2012, mereka kecewa terhadap pengelola taman nasional yang seolah-olah membiarkan orang luar berladang di dalam kawasan. Aksi protes tersebut dilakukan dengan mendatangi kantor balai taman nasional (BTNBD) di Sarolangun. Menurut keterangan pak Sayon Kelana selaku Polhut:

Tahun 2012 mereka datang ke kantor balai difasilitasi oleh Warsi, rencana berangkat jam 12 malam akhirnya jam 4 subuh baru berangkat, yang mau diprotes waktu itu petugas kehutanan masuk tidak ado nangkap orang, orang yang beladang termasuk orang yang jual lahan..., Dio ini sangat mudah menerima suatu keyakinan, apolagi petugas-petugas luar yang masuk, tu mudah gaduh, jadi adu domba antara orang rimba dengan petugas kehutanan (wawancara, 28 Januari 2014).

Kejadian yang hampir sama terjadi ketika pengelola taman melakukan razia di Makekal tengah. Pada awalnya orang rimba dari

Makekal Hulu melakukan protes kepada pengelola taman nasional, protes tersebut dipicu oleh adanya pembukaan lahan yang dilakukan oleh orang terang, namun tidak diproses oleh Polhut. Mereka menekan pengelola taman nasional jika pelaku tidak ditindak tegas mereka akan melakukan demonstrasi ke DPRD dan kantor Polisi, namun orang rimba dari Makekal Tengah mengancam ulang jika orang rimba berangkat melakukan demonstrasi yang didampingi oleh KKI Warsi maka mereka akan membakar kantor KKI Warsi. KKI Warsi yang merasa terancam dalam posisi tersebut akhirnya melakukan negosiasi untuk tidak melanjutkan demonstrasi.

Demonstrasi tidak dilakukan oleh orang Rimba dari Makekal Hulu karena mereka khawatir akan terjadi bentrok antar sesama mereka, kasus tersebut berakhir dengan sendirinya tanpa ada proses negosiasi oleh pengelola taman nasional. Deeskalasi konflik disebabkan Orang rimba dari Makekal Hulu menghargai ketemengungan Ngadap dan wakil Begantung yang menguasai daerah Makekal Tengah, dengan demikian konflik dan protes orang rimba terhadap pengelola taman berakhir dengan sendirinya karena mereka memilih untuk menarik diri.

Aksi kekerasan kolektif, Gerakan perlawanan kekerasan kolektif secara massif muncul berawal dari kegiatan pemusnahan tanaman milik orang terang, namun tanaman yang dimusnahkan tersebut ternyata milik orang rimba. Isu yang diusung adalah pengelola taman nasional sudah ingin menghancurkan hidup orang rimba, karena menghancurkan sumber-sumber kehidupan orang rimba. Selain isu penghancuran hidup orang rimba isu pengusiran terhadap orang rimba dari Bukit Duabelas juga digemboskan dari kalangan orang rimba, akibatnya mempernyam masalah antara orang rimba dengan pengelola taman.

Mereka mendatangi kantor resort Pematang Kabau, membawa rombongan yang dilengkapi senjata tajam dan senjata rakitan (*kecepek*), aksi mereka tidak dapat diatasi oleh pengelola yang pada waktu itu

hanya ada dua orang yakni pak Roni dan Pak Syaiful. Perusakan inventaris negara akhirnya terjadi mengakibatkan pecahnya kaca-kaca kantor dan terbakarnya bagian depan kantor. Pak Syaiful dan pak Roni pada waktu itu berhasil melarikan diri namun kemudian dikenakan *dendo adat* sejumlah 500 kain karena dianggap melanggar hukum adat orang rimba. Kekerasan secara kolektif menyusul pada tahun 2011, Insiden pemusnahan ladang milik orang terang menjadi pemicu terjadinya konflik dan kekerasan, orang rimba yang menjual ladang diprovokasi dan mendapat tekanan dari orang luar pemiliki lahan, karena tekanan tersebut orang rimba depresi dan meminum racun tikus.

Kesalah fahaman terjadi antara orang rimba dengan Pak Roni, orang rimba menanyakan bos (kepala Balai TNBD). Pak Syaiful menjawab ada, pak Syaiful mengira yang dimaksud bos itu adalah pak Roni, karena yang menjabat sebagai kepala resort Air Hitam I desa Pematang Kabau adalah pak Roni. Ketika mereka menanyakan kepala balai kepada pak Roni, pak Roni menjawab tidak ada. Kesalah fahaman orang rimba terhadap pengelola TNBD tidak bisa dihindarkan, mereka melakukan aksi kekerasan terhadap Pak Roni dan pak Syaiful namun rencana pemukulan tersebut berhasil dicegah oleh orang-orang tua dari kalangan orang rimba.

Upaya perlawanan dan konflik vertikal antara orang rimba dengan pengelola taman menyusul pada akhir tahun 2012. Pada saat polisi dari Jambi melakukan razia gabungan membakar rumah warga pemilik lahan yang berada dalam kawasan taman nasional. Pemilik lahan tidak menerima jika rumah tersebut dibakar, di samping itu ia juga tidak ingin rugi karena telah mengeluarkan modal banyak untuk membiayai kebun tersebut, kemudian memobilisasi orang rimba dan orang dari Lubuk Bumbun untuk melakukan protes ke resort Sei Jernih Kecamatan Muara Tabir. Mereka datang berombongan berjumlah tidak kurang dari seratus orang yang terdiri dari orang rimba dan orang Lubuk Bumbun. Pegawai resort yang

358 menjadi sasaran aksi perlawanan orang rimba adalah pak Sayon Kelana dan pak Ahdiyat. Mereka mengancam dengan menodongkan *kecepek* ke arah badan pak Sayon Kelana.

TABEL 2: AKTOR-AKTOR PERLAWANAN BERDASARKAN KELOMPOK, WILAYAH DAN TUJUAN PERLAWANAN.

No	Aktor dan Wilayah	Tujuan
1	<i>Kelompok yang mendukung:</i> Kelompok Ngadap yang berada di Sungkai, Makekal Ilir dan Tengah serta kelompok yang berada di Aerbehan.	Mereka ingin tetap mempertahankan hutan untuk mereka kelola secara intensif, menggantungkan hidup terhadap sumber daya hutan yang ada.
2	<i>Kelompok yang menolak:</i> Anggota kelompok yang berada di Air Panas, anggota kelompok Jelitai di wilayah Kejasung dan SP 5, Pengendun dan anggota KMB di daerah Makekal. Kelompok ini cenderung konflik laten dengan kelompok pendukung kebijakan TNBD.	Kelompok yang menolak ini ingin tetap mendapatkan akses ekonomi (beladang, behumo, jual lahan dan serpehan erta hasil hutan lainnya), dan merubah kebijakan sitem zonasi yang berlaku di TNBD.
3	<i>Kelompok yang mendukung tidak secara penuh:</i> Temggung Rahman di Singosari, Pembubar di Makekal Ulu dan Jelitai di Kejasung Batang Hari, anggota kelompok yang berada di Makekal Tengah dan Ilir.	Kelompok ini cenderung pasif terhadap kebijakan pengelolaan taman nasional. Jika kebijakan dianggap menguntungkan maka mereka mendukung. Namun, sebaliknya mereka akan menolak jika secara diam jika dianggap merugikan.

Sumber: dihimpun dari hasil wawancara dan observasi

Konflik dipicu oleh adanya tuduhan terhadap pak Sayon Kelana bahwa dialah yang membakar pondok tersebut. Namun merasa tidak pernah membakar pondok tersebut, pak Sayon-pun berkilah dengan mengatakan bahwa yang membakar itu adalah polisi dari Jambi. Kemarahan orang rimba memuncak ketika melihat perilaku pak Sayon yang berdalih, orang rimba tidak terima dan terus mengancam akan menembak. Percekcokan mereka dapat dileraikan oleh Mubar yang waktu itu masih menjabat sebagai temenggung daerah Makekal Hulu. Tidak terjadi pengrusakan fasilitas dan aksi kekerasan terhadap pengelola taman, kasus tersebutpun berakhir tanpa ada penyelesaian secara hukum dan secara adat. *Everyday Form of resistance* Orang rimba sebagaimana hidden dan open resisten di atas merupakan

perlawanan yang insidental. Hal ini dilakukan karena perlawanan dilakukan tidak secara terorganisir dengan baik, tidak sistematis lebih bersifat individual meskipun terdapat aksi kolektif. Namun tidak berakibat revolusioner, tidak pula ingin merubuhkan dominasi Balai TNBD. Perlawanan orang rimba hanya bertujuan untuk tetap dapat mengakses sumber daya hutan yang selama ini mereka nikmati secara turun-temurun. Pada awalnya bersifat laten kemudian berevolusi menjadi manifes disebabkan aktifitas mereka mendapat hambatan dan tantangan.

AKTOR-AKTOR PERLAWANAN

Respon orang rimba terhadap kebijakan pengelolaan taman terbagi menjadi tiga kelompok, *pertama*: kelompok yang mendukung kebijakan balai taman nasional, secara nyata kelompok yang mendukung balai adalah mereka orang rimba asli pada umumnya, namun ada juga yang sudah di luar, mereka adalah Nagadap yang mendominasi wilayah Makekal Ilir dan Tengah serta Sungkai, dan kelompok yang berada di Aerbehan.

Kedua: kelompok yang kontra terhadap kebijakan pengelolaan taman nasional, kelompok yang nyata-nyata menolak kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan adalah anggota kelompok yang berada di daerah Air Panas, anggota kelompok yang berada di Singosari, anggota kelompok ketemenggungan Jelitai yang berada di Kejasung dan SP 5, pemuda KMB yang diketuai oleh Pengendum yang pada umumnya daerah kekuasaannya di daerah Makekal Ulu, Makekal Tengah dan Makekal Hilir.

Ketiga: mereka yang mendukung tidak secara penuh, mereka Temenggung Rahman yang berada di Singosari, Pembubar (Mantan temenggung di daerah Makekal Hulu) dan temenggung Celitai pengganti ketemenggungan Pembubar dan temenggung Jelitai di Batang hari. Kelompok ini cenderung tidak ingin banyak terlibat apapun bentuk aktifitas yang dilakukan oleh balai.

Sulit untuk mengklasifikasikan kelompok mana saja yang pro dan kontra terhadap kebijakan pengelolaan taman nasional karena orang rimba merupakan komunitas yang sangat dinamis dalam menentukan sebuah sikap. Jika kebijakan pengelolaan taman dianggap menguntungkan mereka mendukung kebijakan pengelolaan taman nasional, namun jika kebijakan dianggap mengganggu atau mengancam ekonomi mereka, maka terjadi penolakan dengan berbagai alasan dan tuntutan. Berdasarkan hasil data-data lapangan penulis tiga kelompok tersebut disajikan sebagaimana tabel 2.

Pengelompokan ini berdasarkan sikap orang rimba dimana jika sebuah kebijakan yang sifatnya menguntungkan maka orang rimba mendukung balai taman nasional. Jika kebijakan menurut mereka dapat merugikan sikap menolak mulai dimunculkan meskipun di hadapan pegawai balai mereka setuju-setuju saja. Sikap ambigu ini menjadi sulit untuk mengidentifikasi kelompok mana saja yang pro ataupun kontra terhadap kebijakan.

1. SEBAB KEBERLANJUTAN PERLAWANAN ORANG RIMBA

Berdasarkan hasil data lapangan penulis menunjukkan bahwa orang rimba melakukan perlawanan terhadap kebijakan pengelolaan taman disebabkan beberapa faktor. Sebab tersebut sebagaimana berikut:

a. Kekecewaan atas Kebijakan yang Ditetapkan Secara Sepihak

Perlawanan orang rimba sebenarnya telah terjadi sejak masa pengelolaan taman oleh BKSDA, kemudian pada akhir tahun 2007 terjadi transisi pemindahan wewenang dari BKSDA ke Balai TNBD, disadari maupun tidak BKSDA sebenarnya telah mewariskan konflik antara pengelola taman dengan orang rimba. Kebencian orang rimba terhadap dominasi BKSDA sebagai representasi negara beralih kepada Balai Taman Nasional. Dengan demikian balai TNBD hanya menerima warisan masalah dari pengurusan lama.

Perlawanan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk

konflik yang laten dan terbuka antara orang rimba dengan Balai TNBD. Perlawanan ini semata-mata dilakukan bukan hanya alasan subsistensi, dimana mereka menginginkan kebebasan akses terhadap taman nasional tapi juga mereka ada unsur balas dendam terhadap perlakuan pengelola taman yang mengarah ke tindakan refresif. Di lain sisi perlakuan pengelola taman nasional secara individual dan institusional kepada orang rimba banyak menimbulkan konflik yang terus bereskalasi.

Pada fase perencanaan pengelolaan taman nasional, pengelola taman berusaha untuk menyesuaikan tanah-tanah klaim adat menurut orang rimba dan kemudian itu dibuat zona-zona berdasarkan kriteria zona adat orang rimba. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Pak Asep:

Tanah Pasoron dan Tanah Pranokan yang dijadikan Zona inti yang dulunya cagar Biosfer, ada bukit duabelas, bukit Kuaram, dan bukit pemandangan, Kebun-kebun di tempat zona tradisional, Pemanfaatan air terjun, untuk penelitian untuk wisata, yang berkaitan dengan wisata (Wawancara, 05 Februari 2014).

Pengelola taman nasional sebenarnya berusaha mengkolaborasi konsep adat menurut orang rimba dan konsep pengelolaan versi pengelola taman nasional. Orang rimba yang dilibatkan adalah orang-orang tertentu, tidak semua orang rimba yang dilibatkan mengingat keterbatasan waktu dan dana pada waktu pemetaan zonasi.

Sejak proses perencanaan, pembahasan dan penetapan RPTNBD pihak pengambil kebijakan menafikan peran Orang Rimba. Pelibatan sebagian orang rimba hanya pada tahap survey dan sosialisasi setelah kebijakan rencana pengelolaan ditetapkan. Menurut keterangan Pak Syariman:

Waktu membuat zonasi adolah yang dilibatkan, tapi yang lain dak ado ngerti, yang ikut survey tu cuma ditanyo-tanyo jo mano tanah-tanah adat orang rimba., setelah itu suku anak dalam diikutsertakan ketika

sosialisasi dalam pembuatan zona., tapi taman nasional nak diapoan nyo dak do ngerti apo tu taman (wawancara, 29 Januari 2014).

Penetapan kebijakan seperti ini kemudian menimbulkan kekecewaan bagi Orang rimba terhadap pengelola taman nasional. Kebijakan RPTNBD dengan memberlakukan sistem zonasi dinilai berbenturan dengan hukum adat Orang rimba yang mengklaim bahwa hutan TNBD merupakan tanah warisan nenek moyang yang harus dijaga berdasarkan batas dan nama tanah yang telah ditentukan.

Setelah diverifikasi informasi mengenai orang rimba yang melakukan perlawanan, ternyata orang rimba yang ikut survey pemetaan sistem zonasi adalah orang rimba yang tidak memiliki kekuatan ekonomi dan politik, sehingga pada saat sosialisasi dilakukan mereka tidak memiliki power untuk membantah atau bahkan mematahkan argumen-argumen yang diajukan oleh temenggung-temenggung yang berpengaruh pada waktu itu. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Asep:

Saya (Pak Asep) menyertakan empat orang rimba untuk survey rencana zonasi yang akan ditetapkan,,. Mereka harus dibayar, jadi yang diajak untuk survey itu hanya diajak perwakilan dari temenggung, mereka yang tidak kebagian uang untuk ikut survey itu mereka yang melakukan penentangan terhadap sistem zonasi yang ada. Yang diajak yang di dalam, pak Tarib, Kelompok Singosari Ali dan Merendam. Yang ikut sosialisasi yang bukan dua orang itu. Pas sosialisasi, yang pinter yang ngomong, yang ikut survey mereka takut kepada kelompok mayoritas menentang, yang ikut survey bukan temenggung, yang membantah pada saat sosialisasi adalah temenggung yang fokal. Yang menentang biasanya mereka yang hanya ikut pada saat sosialisasi saja (wawancara, 05 Februari 2014).

Pak Tarib salah satu temenggung yang mendominasi wilayah air Hitam, selain memegang jabatan struktural politik dia juga

menguasai kehidupan ekonomi orang rimba. Pak Tarip merupakan orang rimba yang sangat vokal, lihai berdebat, lihai bersilat lidah dan mampu mematahkan lawan debat. Mereka yang dilibatkan dalam survey tidak berani membantah Pak Tarib, karena selain memiliki kekuatan politik dalam hal legitimasi, dia juga mendominasi ekonomi orang rimba selain menjadi toke bagi orang rimba, Tarib juga memiliki dealer motor yang membuka jasa perkreditan untuk Orang rimba.

b. Keruntuhan Adat Istiadat Orang Rimba

Keruntuhan jenang waris, Orang rimba pada masa dulu menempati kawasan hutan antara Tanah Garo sebagai pangkal dan Sungai Serengam (Paku Aji) sebagai ujung wilayah. Hubungan *Jenang/Waris* ini terus terjaga sampai zaman HPH, HPHH, HP, HLG. Setelah penetapan kawasan menjadi kawasan taman nasional hubungan jenang waris ini mulai berkurang. Jenang Untung Abdullah pada masa *bebalok/illegal logging* banyak mengenal orang rimba, maka dia diangkat sebagai Jenang di Sei Lingkar yang mendominasi kekuasaan bagian Batang Hari khususnya kekuasaan ekonomi orang rimba di wilayah yang bersentuhan dengan wilayah yang berada di Maro Sebo Ulu, sekarang menjabat sebagai kepala desa Sei Lingkar, sejak tahun 2011 hubungan orang rimba dengan jenang Untung mulai retak disebabkan Kades Untung banyak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan desa dan sudah tidak lagi masuk hutan.

Di lain sisi orang rimba merasa malu terhadap status sosial jenang yang telah menjabat sebagai kepala kepala desa. Tak lama kemudian pada akhir tahun 2012 mereka pindah ke Daerah Bangkai Anjing tidak jauh dari daerah Batin XXIV. Perpindahan tersebut mengakibatkan perjenangan Untung tidak berfungsi lagi. Orang rimba mengangkat Usman Bepok (pak Usman) kepala desa Padang Kelapo sebagai jenang baru, namun kemudian kepala desa Padang Kelapo juga memiliki banyak aktivitas dan sering pulang pergi ke Jawa. Akibatnya mereka sulit untuk melakukan interaksi dalam

364 urusan ekonomi dan urusan orang rimba lainnya.

Begitu pula dengan Jenang di Pematang Kabau, pada tahun 2013 telah dilakukan pemilihan Jenang di Air Hitam, jenang yang terpilih adalah pak Ismail, namun setelah terpilih belum aktif, dan jenang baru ini dianggap kurang peduli terhadap masyarakatnya, tidak banyak memahami persoalan orang rimba khususnya orang Rimba Air Hitam. Pemilihan jenang baru ini lebih pada pengembalian adat mereka yang selama ini sudah dianggap mulai pudar. Mereka mengeluhkan apabila ada masalah dengan pegawai balai mereka tidak bisa lagi menerapkan hukum adat yang dahulu diterapkan oleh nenek moyang mereka. Sesekali mereka mendapat tekanan jika mereka menjadi orang terang dan mengikuti kehidupan orang terang secara tidak langsung norma yang berlaku adalah adat orang terang.

Sejak kehancuran perjenangan Air Hitam tersebut orang rimba mulai mengurus segala urusan mereka sendiri, kondisi demikian menjadikan mereka rapuh menghadapi realitas sosial yang ada. Hancurnya hubungan Jenang Waris dengan orang rimba disebabkan perambahan hutan secara besar-besaran oleh PT Sawit dan PT lainnya yang dimulai pada tahun 1970-an. Selain disebabkan adanya perambahan hutan yang berlangsung sejak tahun 1970-an, peran LSM seperti KKI Warsi, Sokola Rimba, LSM Kopsad, Walhi Jambi, AMAN, Perhimpunan petani Jambi (PPJ) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumatera Barat yang pernah mendampingi Orang rimba tentu memiliki sumbangsih dalam memberikan suntikan pemahaman baru terhadap pola pengelolaan taman nasional. Keterlibatan LSM-LSM tersebut secara perlawanan menggeser peran jenang waris yang dahulunya kuat, sedikit demi sedikit mulai melemah. Orang rimba tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada jenang waris akan tetapi, mereka menggantungkan masalahnya ke berbagai pihak yang dianggap berafiliasi terhadap mereka.

Orang rimba sedikit demi sedikit tidak lagi tergantung dengan jenang dan waris, yang dikemudian hari mulai kurang terlibat dengan urusan hubungan orang rimba dengan orang luar. Keruntuhan jenang waris ini mengakibatkan orang rimba menyelesaikan sendiri segala bentuk masalah yang dihadapi baik di dalam kawasan maupun masalah yang berkaitan dengan luar kawasan dalam hal, jual beli hasil hutan, jual beli, penyelesaian kasus adat antar sesama orang rimba dan kasus adat orang rimba dengan orang terang.

Kehancuran aturan adat, hidup berdampingan dengan orang terang adalah salah satu pilihan, kehidupan yang sudah mulai berbaur dengan orang terang pada umumnya, memaksa mereka meninggalkan produksi subsisten yang berbarengan dengan adat di dalam *Rimbo*. Menurut Ngadap mereka sudah *keno kutu' adat* sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beliau:

Bale'-bale'nyo keno kutuk adat, sebab kalo lagi dulu-dulunyo "alam sekato tuan, ambo sekato rajo hak milik sekato rakyat. Ana' dak ado lagi nurut sekato bapak, bini dak sekato laki lagi, ra'yat dak lagi sekato penghulu, apo idak kutuk keno macam itu, tu keno perangai macam tu,. Keseluruhan anak Makekal di dalam rimbo iko, buka hutan, la menjual kubur datuk, da' ado tau kubur anak sendiri, dak ado tau kubur bini sendiri, lah keno jual tu mengkonoyo tuhan mereko, sebab bejual adat, Mentubung tenggering anak kanti kito njualnyo (wawancara, 22 Februari 2014).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kalangan orang rimba sendiri sudah tidak harmonis antara anak, ibu dan bapak. Tatanan sosial telah berubah, legitimasi seorang *bepak*, *penghulu*, dan struktur sosial mulai tidak berfungsi lagi. Namun, tidak semua yang berubah berdasarkan wawancara penulis dengan Abdi beliau mengatakan bahwa:

Yang di Timur mereka masih kuat dengan tradisi mereka, mereka kuat menjaga hukum adat mereka, mereka tidak mau dimasuki orang luar, setiap orang yang buka ladang mereka tutup dengan

ladang lagi di situ, itu berlaku umum tidak hanya berada dalam kawasan tapi juga di luar kawasan untuk menghambat mereka masuk ke dalam. Cara yang kedua adalah mempersoalkan mereka, dengan alasan tanpa seizin penghulu-penghulu (Temenggung) di sana, jadi biasanya akan digiring ke hukum adat (wawancara, 6 Januari 2014).

Mereka yang berada di Timur masih menjaga adat dengan cara mempersoalkan siapapun yang dianggap melanggar hukum adat. Terdapat usaha untuk membendung orang luar, dengan cara menghambat mereka untuk tidak masuk ke dalam hutan lindung.

Pada tahun 2012 terbentuk konsensus adat antar temenggung berupa aturan tidak tertulis tentang jual beli lahan yang dilakukan oleh orang rimba dengan orang terang. Aturan tersebut tercantum bagi mereka yang menjual lahan akan dikenakan denda adat. Namun, perkembangan hukum adat tersebut ternyata tidak berlaku imperatif, karena tidak menimbulkan efek jera. Lahir model perlawanan baru, penjualan lahan dilakukan dalam skala besar, uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar denda adat. Lepasnya kungkungan jenang waris dikarenakan adanya asimilasi budaya antara orang rimba dengan orang terang, dengan demikian terjadi kekosongan orang yang *dituokan* yang dipatuhi petuahnya.

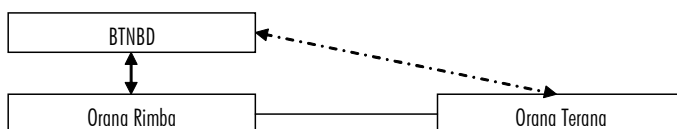
c. Pengaruh dan Kerja Sama Dengan Orang Terang

Mereka mengenal sistem jual-beli, mengenal kehidupan orang luar, mereka hidup berdampingan dan tukar menukar informasi terkait pengelolaan hutan. Proses interaksi antara orang rimba dengan orang tersebut terjadi hubungan yang transaksional dimana mereka melakukan hubungan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terjadi kerja sama dengan orang rimba dengan orang terang dengan dalam hal jual beli lahan, pembukaan lahan serta kerja sama. Posisi orang rimba digambarkan sebagai orang yang *dijinakkan*, orang terang yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap kawasan berusaha

membangun hubungan yang dikenal istilah *bedulur*. Pola hubungan tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut:

367

GAMBAR 1: HUBUNGAN ORANG RIMBA DENGAN ORANG TERANG DALAM MELAKUKAN PENENTANGAN KEBIJAKAN.



Gambar tersebut menunjukkan bahwa Garis panah vertikal (•!) konflik dan perlawanan manifes dan laten orang rimba versus taman nasional. Garis horizontal (“) yang menghubungkan antara orang rimba dengan orang terang menunjukkan kerja sama dalam melakukan penentangan terhadap kebijakan. Garis garis putus-putus (•!?) menunjukkan konflik laten antara Orang terang versus pengelola taman nasional. Secara tidak langsung konflik antara orang terang versus pengelola taman nasional bergeser menjadi konflik dan perlawanan antara orang rimba terhadap pengelola taman nasional, disebabkan orang terang bermain di belakang layar atau menjadi otak dibalik open dan hidden resisten orang rimba.

Keberanian untuk open resisten terhadap kebijakan disebabkan kepentingan terhalangi, didukung pula provokasi-provokasi dari orang terang yang berkepentingan terhadap akses sumber daya hutan di dalam kawasan. Tidak semua orang rimba menolak kebijakan pengelolaan taman nasional, karena mereka memiliki kepentingan terhadap taman nasional untuk kelangsungan hidup anak cucu mereka. Mereka yang mendukung khususnya yang berada di wilayah timur berusaha tetap hidup sebagaimana aturan adat mereka.

Orang rimba dengan orang terang justru terjadi hubungan yang saling menguntungkan, orang rimba berkepentingan untuk mendapatkan uang orang terang juga dapat akses ke dalam kawasan, mendapatkan kebun dari orang dan sumber daya hutan lainnya.

368 Belakangan produktivitas tanaman karet yang diandalkan masyarakat desa melayu semakin menurun dan harga rendah serta tidak stabil disebabkan permainan harga oleh pemilik modal/tauke lokal. Kondisi ini memicu masyarakat desa mencari sumber ekonomi alternatif dengan menjadikan Bukit Duabelas sebagai sasaran empuk yang menjanjikan sesuai dengan model pemanfaatan masing-masing, kesadaran itu terpola yang selama ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat justru sudah lama dieksploitasi pengusaha dari luar melalui kebijakan privatisasi sektor hutan.

Selain ada kerja sama dan hubungan dengan orang terang, orang rimba juga melakukan kerja sama dengan oknum polisi kehutanan. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Syariman:

Ado kerjo samo, nampaknyo orang gesek di dalam tu belum ado yang keno tangkap,. Kalau Polhut nak masuk oarang yang gesek tu lah dak ado., yang jelas ado mato-mato dari dalam terus orang dalam jugo ado yang ngompom-ngompom (wawancara, 23 Februari 2014).

Informasi terkait model kerja sama antar orang rimba dengan pengelola taman nasional tidak didapatkan secara detail. Berdasarkan informasi yang penulis gali dari lapangan, oknum mendapatkan bagian/hasil dari orang-orang melakukan jual-beli *serpehan* dan jual beli lahan. Bentuk kerja sama lain juga diketahui, oknum pengelola selalu memberikan bocoran informasi terkait jadwal patroli rutin yang dilakukan oleh pengelola taman nasional.

Pada tahun 2013 terjadi kerja sama oknum TNI berinisial S dengan Orang rimba, oknum TNI tersebut membuka lahan perkebunan seluas ±30 ha dengan mempekerjakan orang rimba dan orang dusun untuk mengolah kebun tersebut. Tidak lama kemudian kasus tersebut berhasil diselesaikan oleh Polhut, pak Sayon Kelana langsung melaporkan oknum tersebut ke atasannya. Oknum tersebut kemudian dimutasi, dan aktifitas pembukaan lahan juga terhenti. Mengenai pengelolaan lahan kebun milik oknum tersebut tidak diketahui apakah masih berlanjut atau sudah dihentikan tidak ada

penyelesaian secara khusus.

Fungsionalisasi Polhut dan MMP untuk menanggulangi pembukaan lahan, serpehan dan jual lahan justru memperunyam keadaan. Ini dapat dilihat dari keterlibatan anggota Polhut selama bertugas mengamankan kawasan. Tidak hanya Polhut keterlibatan TNI juga menjadi faktor penghambat pengaman kawasan. Pencurian dan lansir kayu oleh orang terang biasanya dilindungi orang rimba berusaha sembunyi-sembunyi dan menghindari petugas maka penjarahan belakangan dilakukan secara terang-terangan.

d. Persaingan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Konflik horizontal orang rimba terjadi antar ketemenggungan, temenggung Ngadap yang menggantikan temenggung Ngukir karena diduga sering terlibat dalam jual beli lahan dan serpehan, awalnya masih berkelit perihal keterlibatannya dalam penjualan lahan, berbagai alasan yang dikemukakan di setiap sidang adat atas protes anggota kelompoknya. Denda adat yang harusnya diberikan kepada temenggung Ngukir atas keteledorannya, selalu dikhianati dengan bersilat lidah, termasuk dalam sidang adat yang mempertanyakan keberadaannya dan pembelaannya terhadap Ngelembu yang dipukul orang desa pada 19 Maret 2011.

Kasus tersebut Ngelembu dipukul oleh Sukri (orang Terang) yang dipicu oleh perdebatan tentang lahan, menurut Sukri lahan garapan Ngelembu telah dibeli namun menurut Ngelembu lahan tersebut belum pernah dijual. Perdebatan akhirnya berujung pelemparan kacang rebus panas kepada Ngelembu, Ngelembu tetap mempertahankan argumennya, Sukri merasa mendapat dukungan dari Ngukir langsung melayangkan pukulan kepada Ngelembu. Tidak terjadi adu fisik karena Ngelembu *ngalah* dan langsung pulang (Novri dan Sukaremi, 2012: 9-10).

Berbeda dengan Ngukir, Ngadap masih ajeg menjaga hutan dan kebun-kebun masyarakatnya yang luas, tidak mau jual lahan di dalam

370 kawasan, tidak juga menjual pohon kayu untuk dijadikan kayu jadi seperti papan, bruti dan jenis kayu olahan lainnya. Meskipun konflik ini bersifat laten akan tetapi menjadi bumerang bagi mereka. Ketemenggungan Mubar yang sekarang diganti oleh Celitai, dan temenggung yang ada di Air Hitam seperti Rahman, Tarib sejak masuk Islam berganti nama sejak H Jailani, Betaring membenci Ngadap, karena Ngadap dianggap bekerja sama dengan orang-orang Balai.

Sikap sentimen terhadap Ngadap lebih dikarenakan Ngadaplah yang dianggap sering melaporkan kejadian pembalakan liar, serta penjualan lahan oleh orang rimba kepada orang terang. Ngadap juga dimusuhi oleh orang rimba yang ada di sekitar Sungai Makekal Ulu yang tidak termasuk dalam wilayah kekuasaannya, orang rimba yang berada di Makekal Ulu berusaha untuk mengklaim tanah rombongan Ngadap yang berada di Sungkai namum, mereka tetap mempertahankan sampai titik darah penghabisan.

Kompetisi juga terjadi antara orang rimba dengan orang terang dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Adapun pola pemanfaatan hutan menurut orang rimba dan orang terang sebagaimana ang tercantum pada Tabel 3.

TABEL 3: POLA PEMANFAATAN HUTAN DAN HASIL HUTAN ORANG RIMBA DAN ORANG TERANG.

Aspek Kepentingan	Orang Rimba	Orang Terang
Hasil Hutan	Orang rimba mendapat keuntungan dapat menjadi buruh upahan mengangkut hasil hutan.	Menjadi bos, toke orang rimba dari penjualan hasil hutan.
Lahan Perkebunan Kayu	Pembukaan lahan, Penjualan, upah pengarapan dari orang terang. Kebutuhan ekonomi, menumbangkan kayu untuk buat kebun.	Pembukaan dan Pembelian lahan, bekerja sama dengan OR dalam mengelola lahan. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan untuk membuat rumah, perabotan rumah dan untuk diperdagangkan.

Sumber: Dihimpun dari hasil wawancara dengan Orang Rimba dengan masyarakat desa.

Persaingan dalam pembukaan lahan oleh orang rimba ternyata

tidak sekuat orang terang pada umumnya, dimana orang terang memiliki modal, alat produksi dan kerja sama yang bagus untuk membuka lahan-lahan di dalam kawasan. Lajunya pertumbuhan ekonomi masyarakat terang yang didukung oleh modal yang besar memicu untuk membuka lahan yang besar atau membuka lahan baru yang belum digarap oleh orang lain.

e. Alasan Tuntutan Ekonomi

Orang rimba melakukan perlawanan disebabkan tingginya tuntutan ekonomi orang rimba. Kasus Jelitai yang memegang kekuasaan ketemenggungan di daerah Kejasung jarang kembali ke Kejasung Besar dan Kecil, menurut informasi yang penulis gali dari Kitmir, Jelitai telah menjual beberapa kebun miliknya dan anggota kelompok tanpa sepengetahuan anggota kelompoknya, dan terakhir juga menjual sebagian perumahan yang dibangun oleh Depsos di SP 5. Uangnya dia gunakan untuk membeli rumah di SP 2 tempat dia bermukim sekarang dengan istri dalam satu *bubung*. Uang hasil penjualan lahan juga ia belikan mobil kijang Kapsul (LGX).

Penulis menemui temenggung Ngadap ketika sedang *Besale*, di sela-sela keluhan karena dimusuhi oleh Orang Rimba lain beliau mengungkapkan bahwa:

Orang rimbo ko jual lahan keno nak beli motor, HP dan bermacam kebutuhan yang lainnya., Macam dulur, lah hidup di kota, itu orang pemalas, segan memancing tenago, nak kerjo segan, nak mencari nang mudah duit dapat, cukuplah pado mulut., payo sukat tanahko sepuluh hektar, sehektarnya pokoknyo bayar tigo juta., pagi pergi ke pasar (wawancara, 23 Februari 2014).

Usaha orang rimba untuk meningkatkan taraf hidup mendorong mereka untuk lebih kompetitif di bidang ekonomi. Ukuran yang digunakan adalah hidup sebagaimana layaknya orang terang yang memiliki kendaraan bermotor, alat komunikasi (*hand phone*), televisi, rumah serta kebutuhan primer dan sekunder lainnya. Usaha hidup

372 sejar juga dilakukan dengan berasilimasi budaya dan agama, beberapa dari mereka sudah memeluk agama Islam dan Kristen. Seperti Pak H Tarib, Pak Rahman, pak Betaring dan orang rimba lainnya yang sudah masuk Islam pada umumnya mereka yang sudah tinggal bersama dan hidup berdampingan dengan masyarakat desa melayu dan masyarakat transmigran.

Argumentasi yang diajukan untuk dapat menjual lahan adalah mereka membutuhkan uang untuk mengobati anak yang sakit, menikahkan anak, membayar utang piutang baik hutang sesama orang rimba maupun hutang kepada toke lokal serta hutang terhadap orang terang. Pak Betaring menjual lahan digunakan untuk menikahkan anaknya yang bernama Metek, hasil jual hutan dia gunakan gunakan untuk merayakan pesta pernikahan anaknya. Hal yang sama dengan Bahtiar dan Nyenang kedua orang ini juga menjual lahan mereka untuk menikahkan anaknya. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pak Selamat warga desa Pematang Kabau:

Bahtiar untuk menikahkan anaknya, sekitar dua hektar, kebun karet di jual.,, Nyenang Ujung Kutai, kebun Betaring itu dijual sama masyarakat untuk menikahkan anaknya Metek, namun kemudian Betaring menyesal, pernah cerita dengan saya, dia nangis karena jual lahan dia (wawancara, 4 Februari 2014).

Selain kasus pak betaring tersebut Mubar mantan temenggung Makekal Hulu juga mengalami hal yang sama dia menjual lahan untuk menikahi adik iparnya karena terkena denda adat. Menurut keterangan Mubar dan depati Udin diceritakan sebagaimana berikut:

Mubar buka 30 hektar, nanam karet, kawin tangkap keno dendo adat, gonceng Betino yang tidak sah keno dendo., Istri Mubar minta'jemput adik ipar, sudah tu dijemput la, marah istrinya, tu jual kebunla jual hutang adat untuk nikahi adik ipar, dia nolong jemput adik ipar dio terutang pulak. Kalau betemu ilok la., meskipun tidak mau satu bubung/satu rumah (wawancara, 27 Januari 2014).

Tidak semua orang rimba yang menjual lahan dikarenakan untuk

kebutuhan pemenuhan isi perut, hutan seluas 60.500 ha dianggap sebagai lahan yang masih sangat luas dan tidak akan habis. Anggapan itu kemudian memicu mereka untuk menjual sebagian karena anggapan orang rimba lahan masih sangat luas. Setelah dikonfirmasi kepada Robert Aritorang yang merupakan aktivis pendamping orang rimba, beliau mengatakan bahwa:

Posisi mereka, mereka di dalam kawasan taman nasional, mereka boleh memanfaatkan hasilnya mereka boleh berladang, tapi mereka juga mau uang cepat, mereka melihat sangat luar untuk mereka, kawasan 60.500, mereka jual dipinggir-pinggir gak apa-apalah, orang desa minta perlindungan kepada mereka, makanya transaksi terjadi, nanti kalau mau di cek atau datang balai misalnya mau menegakkan hukum, mereka bilang mereka dipekerjakan disitu, jadi balai jadi sulit posisinya, bukan cuman itu, oknum balai juga terima dari peladang itu, kesulitan itu terkombinasikan (wawancara, 4 Maret 2014).

Dari hasil wawancara tersebut didapat gambaran bahwa orang rimba yang melakukan resistensi tidak hanya dikarenakan tuntutan ekonomi yang mendera mereka. Akan tetapi mereka mulai pragmatis, kawasan taman nasional bukit duabelas dipandang sebagai lahan yang tidak akan habis karena sangat luas.

2. INTENSITAS KONFLIK DAN PERLAWANAN ORANG RIMBA

Intensitas perlawanan orang rimba terhadap kebijakan pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas sedikit sulit untuk diidentifikasi. Kesulitan tersebut disebabkan adanya perubahan-perubahan bentuk dan sebab perlawanan dari bentuk ke bentuk lain. Sebab perlawanan lahir dari berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain dan memiliki intensitas berbeda. Berdasarkan data lapangan yang penulis peroleh, intensitas perlawanan orang rimba itu setidaknya disebabkan tiga aspek. *Pertama*, aspek ekonomi orang rimba. Orang rimba akan sangat resisten ketika akses ekonomi

374 mereka terhadap taman nasional mendapat hambatan dari pengelola taman nasional. Perlawanan laten berawal dari pembukaan lahan secara terus menerus untuk dijadikan sebagai sumber kebutuhan ekonomi mereka.

Perlawanan orang rimba kemudian berevolusi dari satu bentuk ke bentuk lain, orang rimba membuka lahan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, menanam tanaman ubi-ubian, tanaman obat, buah-buahan, karet maupun sawit. Perlawanan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penjualan hasil hutan berupa hasil sadapan karet, rotan, binatang atau hewan hasil buruan serta segala bentuk sumber daya lainnya. Perlawanan orang rimba tersebut menjadi ketika mereka menjual lahan dan serpehan namun, penjualan tersebut dihalang-halangi oleh pengelola taman. Kondisi demikian memicu perlawanan orang rimba secara terbuka baik secara kekerasan maupun melalui mekanisme debat terbuka. Adapun intensitas tersebut sebagaimana berikut:

GAMBAR 2: INTENSITAS PERLAWANAN ORANG RIMBA DARI ASPEK EKONOMI.

ASPEK EKONOMI	II Jual hasil hutan (karet, rotan, hewan hasil buruan dll)	IV Jual lahan dan serpehan
	I Pembukaan lahan	III Persaingan pengelolaan sumber daya hutan

Kedua, aspek politik orang rimba. Kebijakan pengelolaan taman berdampak pada terbatasnya kekuasaan Orang rimba terhadap taman nasional sedikit secara perlahan menghilangkan akses orang rimba terhadap taman nasional. Di samping itu adanya perbedaan pola pengelolaan yang berdasarkan konsep negara yang top down bertentangan dengan konsep adat orang rimba yang diusahakan secara komunal.

Faktor yang sangat kompleks adalah keterlibatan oknum aparat

negara yang bekerja sama dengan orang rimba untuk mengakses sumber daya taman nasional. Keterlibatan oknum aparat tersebut berelaborasi dengan orang rimba dengan orang terang (OT) yang terkait satu sama lain. Orang rimba membutuhkan bantuan, begitu pula dengan mereka dari oknum aparat dan orang terang, dengan kondisi demikian oknum aparat dan orang terang memanfaatkan orang rimba untuk pasang badan. Adapun intensitas tersebut sebagaimana berikut:

ASPEK POLITIK	II Terbatasnya akses OR dengan adanya sistem zonasi	IV Adanya kerja sama OR dengan orang dusun dan pemilik modal
	I Intervensi TNBD terhadap kehidupan OR dan hilangnya kekuasaan OR terhadap TNBD	III Keterlibatan oknum aparat negara, perbedaan konsep pengelolaan hutan

Ketiga, aspek budaya. Perlawanan orang rimba diawali dengan adanya asimilasi budaya orang rimba dengan orang terang, kesempatan inilah orang rimba mendapat masukan-masukan provokatif dari orang terang. Proses selanjutnya melalui pengaruh-pengaruh dari Orang terang kemudian melemahkan peran dan fungsi jenang-waris dan ketemenggungan orang rimba. Kebijakan pengelolaan taman nasional berpotensi mengancam hilangnya klaim tanah-tanah adat orang rimba yang selama ini mereka jaga. Faktor yang memicu perlawanan adalah hukum dan aturan adat orang rimba sudah mulai tidak berlaku lagi, orang rimba sudah tidak lagi faham akan hukum adat mereka bahkan mereka dengan sengaja menafikan aturan-aturan adat yang mereka buat sendiri. Adapun intensitas konflik dan perlawanan dari aspek budaya sebagaimana berikut:

GAMBAR 4: INTENSITAS PERLAWANAN ORANG RIMBA DARI ASPEK BUDAYA.

ASPEK BUDAYA	II Bergesernya struktur sosial orang rimba dan Hilangnya tanah-tanah adat OR	IV Kehancuran aturan-aturan adat OR
	I Asimilasi budaya OR dengan OT	III Melemahnya fungsi jenang-waris dan ketemunggunan

MELEMAHNYA FUNGSI JENANG-WARIS DAN KETEMUNGGUNAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, sebab perlawanan orang rimba diebabkan tiga faktor yang sangat dominan yaitu: 1). Adanya kerja sama orang rimba dengan orang terang dan adanya keterlibatan oknum aparat, 2). Runtuhnya hukum adat orang rimba yang selama ini dijaga, dan 3). Tuntutan kebutuhan hidup orang rimba yang menyebabkan mereka harus mengambil resiko dengan melakukan perlawanan secara tertutup maupun terbuka.

KESIMPULAN

- a. Resistensi orang rimba yang dilakukan secara berkelanjutan dalam bentuk pembukaan lahan secara terus-menerus, menjual serpehan, menjual lahan yang terletak di dalam kawasan, melakukan demo, debat terbuka dengan petugas balai TNBD, serta aksi kekerasan kolektif disebabkan beberapa faktor. Bentuk perlawanan tersebut mengalami evolusi dari bentuk ke bentuk lain, dengan demikian bentuk perlawanan dipahami tidak hanya satu bentuk yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun perlawanan terus berkelanjutan dari bentuk perlawanan ke bentuk yang lain yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan maupun di waktu berbeda.
- b. Faktor yang menyebabkan perlawanan tersebut adalah:

1. Kekecewaan terhadap kebijakan pengelolaan taman nasional yang ditetapkan dengan tidak melibatkan orang rimba dari formulasi hingga penetapan kebijakan, mereka hanya dilibatkan pada tahanan penetapan sistem zonasi dan sosialisasi.
2. Keruntuhan adat istiadat mereka yang ditandai bergesernya peran Jenang waris, hubungan Jenang waris yang dahulunya berfungsi sebagai perantara orang rimba dengan orang luar serta sebagai penyelesaian sengketa adat sudah tidak lagi berfungsi secara maksimal. Di sisi lain orang rimba yang dahulu kuat memegang hukum adat di kemudian hari mereka sudah mulai meninggalkan adat mereka.
3. Adanya kerja sama dengan oknum aparat dan masyarakat desa melalui sistem pasang badan oleh orang rimba untuk melindungi orang terang, yang berawal dari tekanan dan pengaruh orang terang terhadap orang Rimba.
4. Persaingan pengelolaan hutan, orang yang hidup dinamis bersaing dengan orang terang dan sesama orang rimba untuk terus menerus untuk dapat mengakses sumber daya hutan yang ada.
5. Orang rimba yang sudah hidup konsumtif, mereka dituntut untuk hidup berdampingan dengan Orang terang sementara mereka belum mampu hidup setara seabaimana layaknya orang terang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- After, David E. 1977. Pengantar Analisa Politik, Terj: Tim Penerjemah Yasogama. Jakarta: Rajawali Pers.
- BTNBD. 2010. Statistik Balai Taman Nasional Bukit Duabelas.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, cet ke-v. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Gaus, Gerald F dan Chandran Kukathas. 2013. Handbook Teori Politik, cet ke-ii Terj Derta Sri widowatie. Bandung: Nusa Media.

- Ghee, Lim Teck dan Alberto G Gomes. 1993. *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*, terj: YOI. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hiareic, Erick, et., al (ed). 2004. *Politik Transisi Pasca Soeharto*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Hornby, A.S. 1995. *Oxford Advanced Learner's Dictionary* Oxford University Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kbijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yoyakarta: Gava Media.
- Lobja, Erick. 2003. *Menyeleamatkan hutan dan Hak adat Masyarakat Kei*. Yogyakarta: Debut Press.
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana.
- Mirsel, Robert. 2006. *Teori Pergerakan Sosial, Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis*. Yogyakarta: Resist Book.
- Nugroho, Riant. 2007. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo. UNDP Jakarta, 10-11 Desember 2007, di Gedung Mahkamah Konstitusi.
- Nurudin (ed) et., al. 2006. *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar dan Fisip UMM.
- Novri dan Sukaremi. 2012. *Orang Rimba tak Luput dari Konflik Lahan*. Alam Sumatera
- Pruitt, Dean G dan Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*, cet ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- Ross, Cynthia. 2006. *Before The Blaze, The Spark: The Nature Of Armed Resistance And Its Motivations In World War II*. Thesis, Washington State University.
- Scott, James C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Resistance*, New Haven and London: Yale University Press.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*, terj: Budi Kusworo et., al, Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- Sing, Rajendra. 2010. *Gerakan Sosial Baru*, terj: Eko P. Darmawan. Yogyakarta: Resist Book.
- Veeger, K.J. 1990. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi*, cet ke-iii. Jakarta: PT Gramedia.
- Wiratmoko, Nick T, et., al, (Penyunting). 2004. *Yang Pusat dan Yang Lokal, Antara Dominasi, Resistensi dan Akomodasi Politik di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pustaka Percik.
- Winarmo, Budi.2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Edisi dan Edisi Terbaru. Yogyakarta: CAPS.

JURNAL

- Cote, Denis dan Cliché, Laura. 2011. "Indigenous Peoples' Resistance to Oil Palm Plantations in Borneo". *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*.
- Holmes, George. 2007. "Protection, Politics and Protest: Understanding Resistance to Conservation, Conservation and Society". Pages 184-201, Volume 5, No. 2.,
- Naim, Moctar. Masyarakat Adat terpencil di Asia, Makalah disampaikan pada "Realisasi Perlindungan Masyarakat Hukum Adat". Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI, Depos RI, KOMNAS HAM, Setnas Masyarakat Hukum Adat, ILO

REGULASI

SK Menhutbun Nomor 258/Kpts-II/2000 tentang Perubahan Fungsi Hutan Produksi Hutan Terbatas Serengam Hulu Seluas \pm 20.700 (Dua Puluh Tujuh Ribu Tuuh Ratus) Hektar dan Sebagian Hutan Produksi Tetap Serengam Hilir Seluas \pm 11.400 (Sebelas Ribu Empat Ratus) Hektar Serta Penunjukan Sebagian Areal Penggunaan Lain Seluas \pm 1.200 (Seribu Dua Ratus) Hektras dan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Cagar Biosfer) Bukit Duabelas Seluar \pm 27.200 (Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus) Hektar Yang Terletak Di Sarolangun Bangko, Batang Hari dan Bungo Tebo, Propinsi Jambi Menjadi Taman Nasional Seluas 60.500 (Enam Puluh Ribu Lima Ratus) Hektar dan Diberi Nama Taman Nasional Bukit Duabelas.

379